



LAPORAN KINERJA

LPMP GORONTALO

TAHUN 2018



Kata Pengantar

*P*uji syukur kita panjatkan ke H adirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat rahmat-Nya LPMP Gorontalo dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 sebagai perwujudan laporan kinerja lembaga.

Laporan Kinerja LPMP Gorontalo Tahun 2018 tersusun sebagai hasil sinergi Tim SAKIP yang meliputi Tim Pelaporan Kinerja, Tim Pemantauan Pelaksanaan Program/ Kegiatan serta kontribusi dari pelaksanaan evaluasi internal yang dilakukan oleh Tim SPI (Satuan Pengawasan Internal) di LPMP Gorontalo.

LAKIP Tahun 2018 merupakan laporan akuntabilitas kinerja tahun ke-3 periode perencanaan strategis 2015-2019 yang menguraikan capaian LPMP Gorontalo dalam merealisasikan tugasnya melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen).

Data capaian kinerja yang terangkum secara sistematis ini adalah pertanggungjawaban dari pelaksanaan program kerja LPMP yang menjadi suplai informasi kinerja bagi unit utama pembina, yaitu Ditjen Dikdasmen.

Capaian kinerja dideskripsikan berdasarkan indikator kinerja Ditjen Dikdasmen dan LPMP yang tertuang dalam Lampiran Renstra Kemdikbud dan Renstra Ditjen Dikdasmen Tahun 2015-2019. Indikator-indikator yang dimaksud berkaitan erat dengan fungsi-fungsi LPMP yang dilaksanakan oleh Seksi Sistem Informasi; Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi ; Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan ; dan Subbagian Umum serta dukungan kelompok jabatan fungsional.

Melalui laporan ini, LPMP Gorontalo berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang capaian kinerja fisik dan kinerja keuangan pada Tahun 2018. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam merencanakan program kerja sebagai dukungan pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional khususnya di Provinsi Gorontalo.

Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan LPMP Gorontalo beserta seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama bekerja optimal untuk menghadapi tantangan pembangunan pendidikan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa meridhoi usaha kita. Aamiin.

Gorontalo, 18 Januari 2019

Kepala,



Drs. H. Amin Nusi, M.Pd
NIP. 19640922199203100

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR, TABEL, DIAGRAM	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA LPMP GORONTALO	6
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	6
B. Perjanjian Kinerja	8
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA LPMP GORONTALO	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Dampak dari Pelaksanaan Program Nasional	45
C. Realisasi Anggaran	46
BAB 4 PENUTUP	56

Lampiran-Lampiran:

1. Dokumen Perjanjian Kinerja LPMP Gorontalo Tahun 2018
2. Rencana Kinerja Tahunan LPMP Gorontalo 2015-2019
3. Laporan Daya Serap Format B-19, Desember 2018
4. DIPA LPMP Gorontalo Tahun 2018

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur Organisasi LPMP

Gambar 3.1. Infografis Pemetaan Mutu Pendidikan

Gambar 3.2. Infografis Implementasi K13

Gambar 3.3. Infografis Pengembangan Sekolah Model

Gambar 3.4. Infografis Layanan Data Informasi

Gambar 3.5. Infografis Pelaksanaan SAKIP

Daftar Tabel

Tabel 3.1. Pengukuran berbasis IKK

Tabel 3.2. Pengukuran berbasis Output RKAKL Tabel

3.3. Sekolah Pelaksana K13 tahun 2015 -2018 Tabel 3.4.

Faktor Pendukung dan Kendala

Tabel 3.5. Dampak Pelaksanaan Program Nasional Tabel

3.6 Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja 2018 Tabel 3.7.

Perubahan Pagu Awal dan Akhir tahun

Tabel 3.8. Perbandingan Daya Serap 2015- 2018 Tabel

3.9. Pelaksanaan Efisiensi Anggaran Tabel 4.1.

Rekomendasi Tahun 2018

Daftar Diagram

Diagram 3.1. Rerata Capaian SNP per Standart tahun 2016-2018

Diagram 3.2. Perbandingan Rerata capaian SNP 2016 - 2018

Diagram 3.3. Realisasi Keuangan per IKK

Diagram 3.4. Rencana Vs Realisasi Tahun 2018

Diagram 3.5. Perbandingan Pagu dan Realisasi antar Output Diagram

3.6. Perbandingan Pagu dan Realisasi antar unit kerja

Daftar Singkatan

Kemdikbud: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Permendikbud RI: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
PP: Peraturan Pemerintah
Perpres: Peraturan Presiden
Renstra: Rencana Strategik
Dapodik: Data Pokok Pendidikan
LAKIP: Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
DIPA: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
IKK: Indikator Kinerja Kegiatan
Ditjen: Direktorat Jenderal
Dikdasmen: Pendidikan Dasar dan Menengah
UPT Pusat: Unit Pelaksana Teknis Pusat
LPMP: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
PMS: Pemetaan Mutu dan Supervisi
FPMP: Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan
SI: Sistem Informasi
SNP: Standar Nasional Pendidikan
SD: Sekolah Dasar
SDBM: Sekolah Dasar Budaya Mutu
SMP: Sekolah Menengah Pertama
SMA: Sekolah Menengah Atas
SMK: Sekolah Menengah Kejuruan
RKAS: Rencana Kerja Anggaran Sekolah
K13: Kurikulum 2013
SKKNI: Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia
DUDI: Dunia Usaha/Industri
Monev: Monitoring dan Evaluasi
Bimtek: Bimbingan Teknis
IHT: Inhouse Training
SPMP: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
SPMI: Sistem Penjaminan Mutu Internal
SPME: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
PMP: Penjaminan Mutu Pendidikan
UN: Ujian Nasional



PIMPINAN L P M P GORONTALO

CAPACITY DEVELOPMENT



DR. H. MARADA, S.Si, MM
Kasi Subbag Umum

IRAWATI MASIA, SE, M.Si
Kasi FPMP

Drs. AMIN N. NUSI, M.Pd
KEPALA

Dra. HASMI DUMBI, M.Pd
Kasi PMS

EKY A. PUNU, SE
Kasi SI

Ikhtisar Eksekutif

*P*elaksanaan Program Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Gorontalo dilaksanakan menginduk pada sasaran strategis Ditjen Dikdasmen dan indikator kinerja LPMP dalam Lampiran Renstra Kemdikbud dan Renstra Ditjen Dikdasmen 2015-2019 yang terdiri atas tiga kelompok program strategis, yaitu:

1. Pembinaan penjaminan mutu pendidikan (Program Setditjen Dikdasmen), yang memayungi kegiatan-kegiatan pemetaan mutu pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi Gorontalo;
2. Peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan (Program LPMP), yang memayungi kegiatan-kegiatan supervisi dan fasilitasi dalam pencapaian SNP pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi Gorontalo;
3. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya (Program Setditjen Dikdasmen), yang memayungi kegiatan-kegiatan dalam fungsi LPMP melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan serta tata kelola urusan administrasi .

Dari penetapan sasaran strategis Ditjen Dikdasmen dan indikator kinerja LPMP tersebut, dapat digarisbawahi bahwa penetapan tersebut telah sejalan dengan tugas dan fungsi LPMP di provinsi Gorontalo yaitu melakukan pemetaan, supervisi dan fasilitasi serta dukungan tata kelola kelembagaan yang handal.

Hal tersebut juga selaras dengan visi dan misi LPMP Gorontalo, yang bercita -cita konsisten melaksanakan tugas dan fungsi dengan semangat gotong-royong menuju pencapaian mutu pendidikan sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan.

Bentuk nyata gotong royong yang dilakukan adalah bersinergi baik dengan unit-unit pembina di Kemdikbud, menjalin kerja sama dengan mitra pendidikan di Provinsi Gorontalo serta mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dalam

merencanakan pembangunan pendidikan nasional khususnya di Provinsi Gorontalo.

Pencapaian kinerja LPMP Gorontalo Tahun 2018 sebagai pertanggungjawaban kontrak kerja Kepala LPMP dengan Direktur Jenderal Dikdasmen diukur berbasis pada ketercapaian 5 indikator di bawah ini:

1. Persentase SD, SMP, SMA dan SMK yang telah dipetakan mutu
2. Persentase SD, SMP, SMA dan SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.
3. Jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah.
4. Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan serta koordinasi lintas sektoral bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Jumlah kerjasama dan kemitraan institusi/instansi dalam dan luar negeri

Data pencapaian kinerja juga disuplai oleh realisasi 6 output RKAKL yang tertuang dalam DIPA LPMP, yaitu:

1. Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya
2. Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP
3. Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013
4. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
5. Layanan Internal (Overhead)
6. Layanan Perkantora

Seluruh rangkaian penguatan SAKIP LPMP Gorontalo dilaksanakan dengan semangat membangun komitmen bersama pada seluruh unit kerja untuk mencapai target kinerja lembaga yang optimal dan berkontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Gorontalo khususnya.

Hasil pengukuran kinerja fisik yang merupakan wujud keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan mencapai 99.98 %, sedangkan terkait realisasi penggunaan anggaran tercapai sebesar 90.28 %.

Realisasi anggaran pada capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- IKK Persentase SD, SMP, SMA dan SMK yang telah dipetakan mutunya :
teralisasi anggaran sebesar Rp. 1.345.728.200,- sekitar 80.57 %
- IKK Persentase SD,SMP,SMA dan SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi
dalam pencapaian SNP teralisasi anggaran sebesar Rp. 6.367.043.580,- sekitar
73.97 %
- IKK Jumlah layanan system pendataan dan informasi pendidikan dasar dan
menengah, teralisasi sebesar Rp. 5.531.000,- sekitar 15.01%
- IKK Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan
pengendalian kegiatan serta koordinasi lintas sektoral bidang Pendidikan Dasar dan
Menengah teralisasi anggaran sebesar Rp. 2.166.191.496,- sekitar 98.57 %

Jika dideskripsikan berbasis output RKAKL, maka capaian realisasi anggaran dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- ✚ Output Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya, teralisasi
anggaran sebesar Rp. 1.351.259.200,- sekitar 79.15 %
- ✚ Output Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP, teralisasi
anggaran sebesar Rp. 3.201.869.700,- sekitar 99.34 %
- ✚ Output Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum 2013, teralisasi
anggaran sebesar Rp. 3.835.210.530,- sekitar 63.26 %
- ✚ Output Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, teralisasi anggaran sebesar Rp.
2.166.191.496,- sekitar 98.57%
- ✚ Output Layanan Internal(Overhead), teralisasi anggaran sebesar
Rp.14.865.089.363,- sekitar 95.34 %
- ✚ Output Layanan Perkantoran, teralisasi anggaran sebesar Rp. 11.833.022.725,-
sekitar 97.09 %

Dampak dari Pelaksanaan Program Nasional :

No	Program	Keluaran Program	Manfaat yang dihasilkan
1.	Pemetaan Mutu Pendidikan	Tersedianya Potret Mutu Pendidikan	Tersedianya Potret Mutu Pendidikan
2.	Fasilitasi melalui Implementasi K13	Terwujudnya seluruh satuan pendidikan di provinsi Gorontalo yang melaksanakan K13	Terwujudnya seluruh satuan pendidikan di provinsi Gorontalo yang melaksanakan K13
3.	Fasilitasi melalui Pendampingan Sekolah Model	Fasilitasi melalui Pendampingan Sekolah Model	Hasil potret mutu didampingi LPMP,
4.	Peningkatan mutu sekolah berbasis SNP		

Adapun langkah-langkah yang masih perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas capaian kinerja di tahun yang akan datang antara lain:

1. Perlu melakukan koordinasi/sinkronisasi lebih akurat dengan Ditjen Dikdasmen terkait penetapan sasaran strategis/indikator kinerja serta target kinerja.
2. Merumuskan outcome di setiap program/kegiatan yang dilakukan sebagai pemenuhan penilaian SAKIP yang baik, serta memperkuat eksistensi peran LPMP dalam penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Gorontalo.
3. Pelaksanaan koordinasi yang baik dengan Tim Penjaminan Mutu Ditjen Dikdasmen terkait pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan untuk memenuhi penghitungan capaian indeks efektivitas satuan pendidikan yang valid dan bermakna.

Pada intinya, laporan kinerja ini disusun dengan memperhatikan reliabilitas, validitas dan akuntabilitas informasi di dalamnya

Bab 1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia, untuk itu setiap warga negara berhak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Memenuhi hak tersebut, karena itulah pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Dalam amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia, memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan pada Bab XIII yaitu Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 31 ayat 1 berisi tentang hak setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan Pasal 31 ayat 2-5 berisi tentang kewajiban negara dalam pendidikan. Pasal 32 berisi tentang kebudayaan. Dimana kebudayaan dan pendidikan adalah dua unsur yang saling mendukung satu sama lain. Penyelenggaraan pendidikan nasional ini diatur oleh Undang-Undang yang berlaku.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan memiliki program utama melaksanakan peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan. Peran tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional khususnya di Provinsi Gorontalo . Program-program yang dilaksanakan LPMP Gorontalo juga dimanfaatkan sebagai kontribusi untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional di Indonesia.

Isu Strategis

Program penjaminan mutu pendidikan yang dilakukan LPMP diharapkan dapat mengatasi permasalahan pendidikan yang terjadi khususnya di Provinsi Gorontalo . Masih banyak sekolah di Gorontalo yang belum optimal mencapai kualitas mutu pendidikan, sehingga LPMP Gorontalo berfokus pada 6 isu berikut ini:

- 1. Satuan pendidikan kurang mampu melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan berkaitan dengan pencapaian SNP;**
- 2. Satuan pendidikan masih lemah dalam melibatkan jejaring/stakeholder agar percepatan peningkatan mutu pendidikan tercapai**
- 3. Kelemahan akurasi data yang menyebabkan potret mutu sekolah di Provinsi Gorontalo kurang valid;**
- 4. Masih banyak sekolah dengan capaian mutu sekolah di bawah SNP;**
- 5. Adanya kewajiban untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 di seluruh satuan pendidikan, yang ditargetkan tercapai di Tahun 2019;**
- 6. Adanya kewajiban sekolah pelaksana Kurikulum 2013 untuk melaksanakan program pendidikan abad 21, pendidikan karakter dan literasi sekolah;**

Keenam isu strategis bidang pendidikan di Provinsi Gorontalo tersebut perlu perencanaan pembangunan pendidikan yang tepat sasaran agar permasalahan dapat diatasi. Keberhasilan dalam penyelesaian masalah-masalah pendidikan tersebut juga tidak lepas dengan terwujudnya kerja sama yang sinergis antara LPMP Gorontalo dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Gorontalo .

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja LPMP Gorontalo Tahun 2018 disusun dengan berlandaskan hukum PP No. 8 Th. 2006 Tentang Pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja; Perpres No. 29 Th. 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan&RB No. 53 Th. 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Permendikbud RI No. 9 Th. 2015 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Renstra 2015 - 2019 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah serta LPMP Gorontalo.

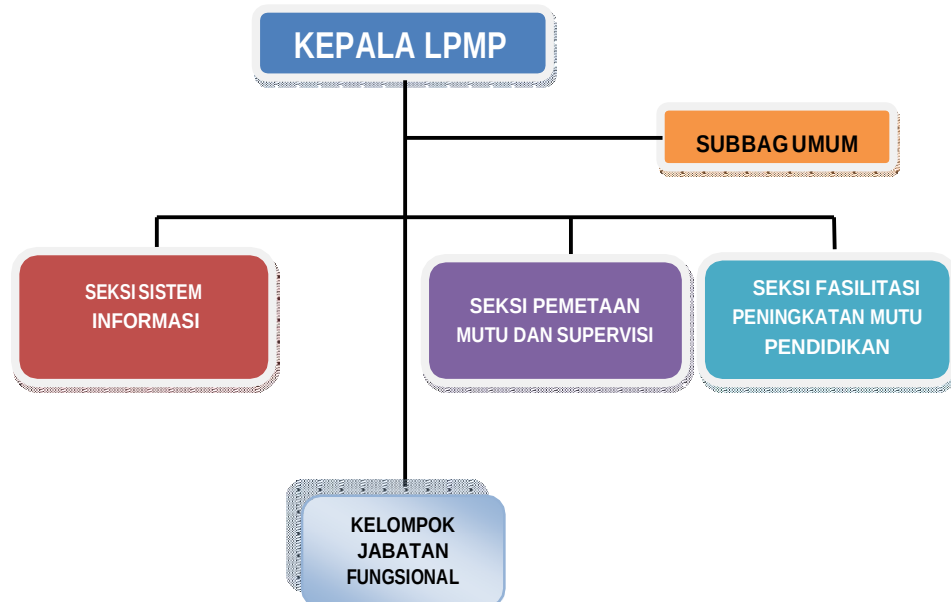
Segala aktivitas pembiayaan atas program/kegiatan dibebankan pada DIPA LPMP Gorontalo No: 023.03.2.41951/2018 Tgl: 5 Desember 2018.

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

LPMP sebagai kepanjangan tangan Kemdikbud di tingkat provinsi memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas, LPMP Gorontalotelah menyusun organisasi tata kerja sebagai berikut:



Gambar 1.1: Struktur Organisasi LPMP

LPMP Gorontalo sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, Ditjen Dikdasmen-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, wajib menyusun laporan kinerja sebagai salah satu informasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan kinerja lembaga disusun berdasarkan petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja sebagai lembaga pemerintah.

Fungsi Renstra LPMP

Seluruh LPMP yang berada di masing-masing provinsi di Indonesia dituntut untuk menyusun perencanaan guna mencapai tujuan pembangunan pendidikan. Perencanaan yang disusun untuk merealisasikan rencana pembangunan yang berfokus pada penguatan pelayanan penjaminan mutu pendidikan. LPMP Gorontalo telah menyusun Rencana Strategis 2015-2019 dimana layanan

penjaminan mutu pendidikan difokuskan pada 2 bidang utama yaitu pemetaan mutu pendidikan serta supervisi dan fasilitasi dalam pencapaian SNP.

Tujuan Penyusunan LAKIP

Salah satu upaya LPMP Gorontalo dalam pencapaian target kinerja tata kelola kelembagaan yang handal adalah dengan menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja yang bertujuan untuk:

1. Memberi penjelasan tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian output dan outcome pada tiap indikator kinerja kegiatan;
2. Memberi penjelasan tentang kendala/hambatan dalam pencapaian sasaran strategis;
3. Merekomendasikan perbaikan kinerja yang terencana untuk mencapai predikat lembaga yang akuntabel;
4. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Gorontalo.

Waktu Penyampaian LAKIP 2018

Secara umum, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja LPMP Gorontalo Tahun 2018 ini untuk memenuhi kewajiban UPT dalam penyampaian laporan kinerjanya, berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kemdikbud No.71324/A.A2/KU/2017 Tanggal 28 November 2018 tentang Laporan Kinerja 2018.

UPT Kemdikbud dapat menyampaikan laporan kinerja dimaksud paling lambat Minggu ke-4 Bulan Januari 2018. Hal ini sebagai perwujudan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima.

Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan laporan kinerja lembaga yang tepat waktu, reliabel, valid, dan akuntabel merupakan hal penting yang harus dipenuhi.



Bab 2

PERENCANAAN KINERJA LPMP GORONTALO

PERENCANAAN KINERJA
LPMP GORONTALOBAB
2

A. Rencana Strategis 2015-2019

Visi

Sebagai unit pelaksana teknis yang berada di dalam naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), LPMP mendukung setiap perencanaan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikdasmen. Salah satunya adalah visi yang dimiliki LPMP harus selaras dengan visi dan misi Ditjen Dikdasmen, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Tema pembangunan pendidikan Kemdikbud 2015-2019 difokuskan pada penguatan layanan pendidikan, sebagaimana tercermin di dalam visi Kemdikbud yaitu

“Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”

Visi Ditjen Dikdasmen yaitu

“Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dasar dan menengah yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong”

Maka sejalan dengan visi Kemdikbud dan Ditjen Dikdasmen tersebut, LPMP Gorontalo merumuskan visi lembaga dalam Renstra 2015-2019 yang selaras dengan keduanya, yaitu:

“Terwujudnya Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Gorontalo Bermutu, Berkarakter dan Berdaya saing”

Misi

Untuk mencapai visi LPMP Gorontalo, visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yang akan memayungi pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi yang dilaksanakan untuk mencapai visi LPMP Gorontalo adalah:

1. Mewujudkan ekosistem satuan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dalam proses layanan pendidikan mencapai standar pendidikan nasional (SNP) di Provinsi Gorontalo
2. Mewujudkan ekosistem satuan pendidikan dasar dan menengah yang pelaku pendidikan, peserta didiknya dan outputnya menjunjung tinggi nilai-nilai karakter untuk hidup bersama, mampu berempati serta menjadi pemberi solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat di provinsi Gorontalo
3. Mewujudkan satuan pendidikan dasar dan menengah yang berdaya saing mencirikan kompetensi critical thinking, creative, collaborative dan communicative (4C) dan berdaya literasi tinggi di Provinsi Gorontalo

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Untuk merealisasikan visi dan misi LPMP, maka perlu sasaran-sasaran strategis Tahun 2015-2019 yang diturunkan dari Renstra Kemdikbud dan Renstra Ditjen Dikdasmen 2015-2019 agar lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran keterlaksanaan misi dan tercapainya visi. Berikut adalah sasaran strategis beserta indikator kinerja LPMP yang juga menginduk pada Ditjen Dikdasmen:

Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Program/ SK/IKK Dikdasmen-Setditjen		
		Jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah
		Jumlah dokumen rumusan

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan serta koordinasi lintas sektoral bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
		Jumlah kerja sama dan kemitraan institusi/instansi dalam dan luar negeri

Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Pembinaan penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase SD, SMP, SMA dan SMK yang telah dipetakan mutunya
Program/ SK/IKK LPMP		
Peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase SD, SMP, SMA dan SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

B. Perjanjian Kinerja

Fokus peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan 2015-2019 dituangkan dalam sebuah kontrak kerja. Berikut kutipan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang dijadikan acuan dalam pengukuran kinerja lembaga:

*Salinan Perjanjian Kinerja 2018***PROGRAM : Pendidikan Dasar dan Menengah****KEGIATAN : Penjaminan Mutu Pendidikan**

NO.	OUTPUT	TARGET
	<i>Pemetaan Mutu Pendidikan & Penghitungan Indeks Efektivitas Satuan Pendidikan</i>	
1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	100% (935 sekolah)
2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	80%
3	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	100%

		(329 sekolah)
4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	80%
5	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	100% (61 sekolah)
6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	75%
7	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	100% (56 sekolah)
8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	85%
	<i>Satuan Pendidikan yang Melaksanakan K13</i>	
1	Persentase SD yang melaksanakan Kurikulum 2013	100% (376 sekolah)
2	Persentase SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013	100% (139 sekolah)
3	Persentase SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013	100% (20 sekolah)
4	Persentase SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	100% (21 sekolah)
	<i>Fasilitasi Sekolah Model</i>	
1	Persentase SD yang difasilitasi sebagai sekolah model	2% (66 sekolah)
2	Persentase SMP yang difasilitasi sebagai sekolah model	3% (36 sekolah)
3	Persentase SMA yang difasilitasi sebagai sekolah model	4% (24 sekolah)
4	Persentase SMK yang difasilitasi sebagai sekolah model	2% (18 sekolah)

Jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan penjaminan mutu pendidikan di LPMP Gorontalo Tahun 2018 sebesar Rp 40.970.760.000,- (Empat Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Dokumen Perjanjian Kinerja LPMP Gorontalo Tahun 2018 tersebut pada realisasinya mengalami perubahan -perubahan terkait terjadinya revisi pagu dan program yang dilakukan.

Implementasi dari dokumen Perjanjian Kinerja terlampir di atas, dilaksanakan dalam suatu rencana aksi yang disusun dalam periode triwulan oleh 4 unit kerja di LPMP Gorontalo, yakni Seksi SI, Seksi PMS, Seksi FPMP serta Subbagian Umum.

Implementasi Rencana Aksi

Rencana aksi LPMP Gorontalo disusun dengan periode triwulan. Informasi dalam rencana aksi menggambarkan rincian pelaksanaan kegiatan dalam dua jenis format isian.

□ **Format Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Berisi tentang informasi nama kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan, sasaran/volume kegiatan, tujuan, manfaat serta hasil kegiatan.

□ **Format Kendala/Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

Berisi tentang informasi nama kegiatan, permasalahan, konsep pemecahan masalah dan pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian masalah.

Penyampaian rencana aksi dilakukan dalam suatu forum rapat rutin triwulan, atau dengan mengisi format pemantauan pelaksanaan program beserta format kendala/masalah per triwulan. Rekap hasil pengisian format tersebut didistribusikan kepada seluruh unit kerja, tim penyusun program dan tim SPI untuk digunakan sebagai alat kendali pelaksanaan program/kegiatan secara periodik.

Bab 3

AKUNTABILITAS KINERJA LPMP GORONTALO

AKUNTABILITAS KINERJA LPMP GORONTALO

BAB 3

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja dapat dideskripsikan sebagai hasil dari pengukuran kinerja. Dimana pengukuran kinerja itu sendiri adalah bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Hasil pengukuran yang valid akan menghasilkan informasi yang akuntabel dan bermanfaat.

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh LPMP Gorontalo pada Laporan Kinerja Tahun 2018 didasari oleh dua dokumen:

1. Dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai penjabaran dari amanat indikator kinerja kegiatan (IKK) Direktorat Dikdasmen dan LPMP yang tertuang dalam Renstra Kemdikbud 2015-2019;
2. Dokumen DIPA (Output RKAKL), sebagai rencana aksi pencapaian target IKK.

Keterkaitan antara indikator kinerja dan output RKAKL LPMP Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Output RKAKL
Program/SK/IKK Dikdasmen-Setditjen			
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah	Layanan dukungan manajemen eselon 1
		Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan serta koordinasi lintas sektoral bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Layanan dukungan manajemen eselon 1
		Jumlah kerja sama dan kemitraan institusi/instansi dalam dan luar negeri	

Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Output RKAKL
Program/SK/IKK Dikdasmen-Setditjen			
Pembinaan penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase SD, SMP, SMA dan SMK yang telah dipetakan mutunya	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya
Program/SK/IKK LPMP			
Peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Persentase SD, SMP, SMA dan SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	- Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP (sekmod) - Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum 2013 (K13)

Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja LPMP Gorontalo yang dilakukan pada dua jenis dokumen, rincian butir-butir pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja berbasis IKK (Dokumen Perjanjian Kinerja)
 - a. Persentase SD, SMP, SMA dan SMK yang telah dipetakan mutunya;
 - b. Persentase SD, SMP, SMA dan SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP.

Dan 3 indikator lainnya yang tidak termuat di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja namun pengukurannya diakomodir pada Output RKAKL, yakni :
Jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah;

- a. Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan serta koordinasi lintas sektoral bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Jumlah kerjasama dan kemitraan institusi/instansi dalam dan luar negeri.

NO.	OUTPUT	TARGET	REALISASI
Pemetaan Mutu Pendidikan & Penghitungan Indeks Efektivitas Satuan Pendidikan			
1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	100% (935 sekolah)	100% (935 sekolah)
2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	79,88 %
3	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	100% (329 sekolah)	100% (329 sekolah)
4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	68,57 %
5	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	100% (61 sekolah)	100% (426 sekolah)
6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	75%	70 %
7	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	100% (56 sekolah)	100% (56 sekolah)
8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	85%	72,9 %
Satuan Pendidikan yang Melaksanakan K13			
1	Persentase SD yang melaksanakan Kurikulum 2013	100% (376 sekolah)	100% (376 sekolah)
2	Persentase SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013	100% (139 sekolah)	99% (139 sekolah)
3	Persentase SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013	100% (20 sekolah)	96% (20 sekolah)
4	Persentase SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	100% (21 sekolah)	99% (21 sekolah)
Fasilitasi Sekolah Model			
1	Persentase SD yang difasilitasi sebagai sekolah model	1% (66 sekolah)	1% (66 sekolah)
2	Persentase SMP yang difasilitasi sebagai sekolah model	11% (36 sekolah)	11% (36 sekolah)
3	Persentase SMA yang difasilitasi sebagai sekolah model	24% (24 sekolah)	24% (24 sekolah)
4	Persentase SMK yang difasilitasi sebagai sekolah model	32% (18 sekolah)	32% (18 sekolah)

Tabel3.1.Pengukuran berbasis IKK

2. Pengukuran Kinerja berbasis Output RKAKL (Dokumen DIPA)

- a. Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya
- b. Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP
- c. Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013
- d. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
- e. Layanan Internal (Overhead)
- f. Layanan Perkantoran

NO.	OUTPUT	TARGET	REALISASI
1	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	1.382 sekolah	1.381 sekolah
2	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	144 sekolah	144 sekolah
3	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	549 sekolah	556 sekolah
4	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	7 layanan	7 layanan
5	Layanan Internal (Overhead)	4 layanan	4 layanan
6	Layanan Perkantoran	12 bulan	12 bulan

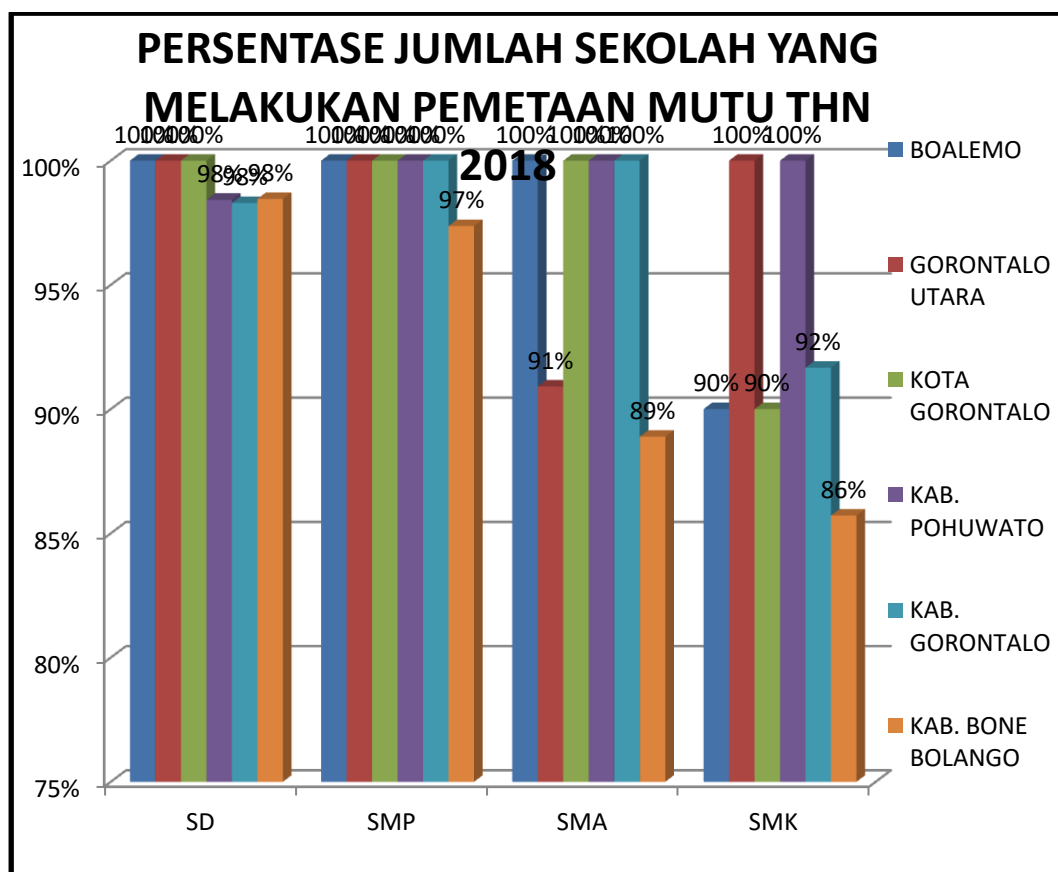
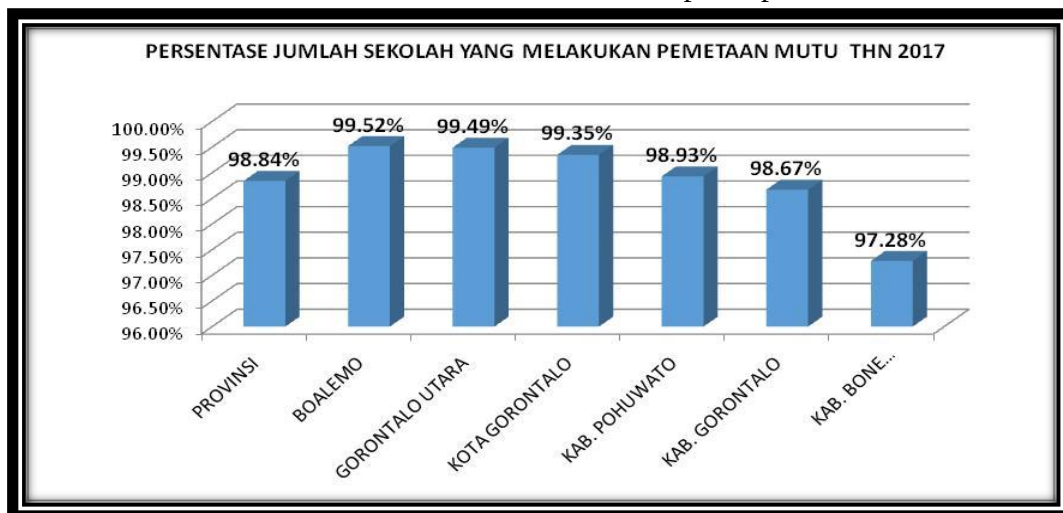
Tabel3.2.Pengukuran berbasis Output RKAKL

Kedua hasil pengukuran tersebut di atas akan digunakan sebagai basis data capaian kinerja LPMP Gorontalo Tahun 2018.

Deskripsi Capaian Indika tor Kinerja

a. Pemetaan Mutu Pendidikan & Penghitungan Indeks Efektivitas Satuan Pendidikan

Hasil Peta Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo Rerata capaian per standar

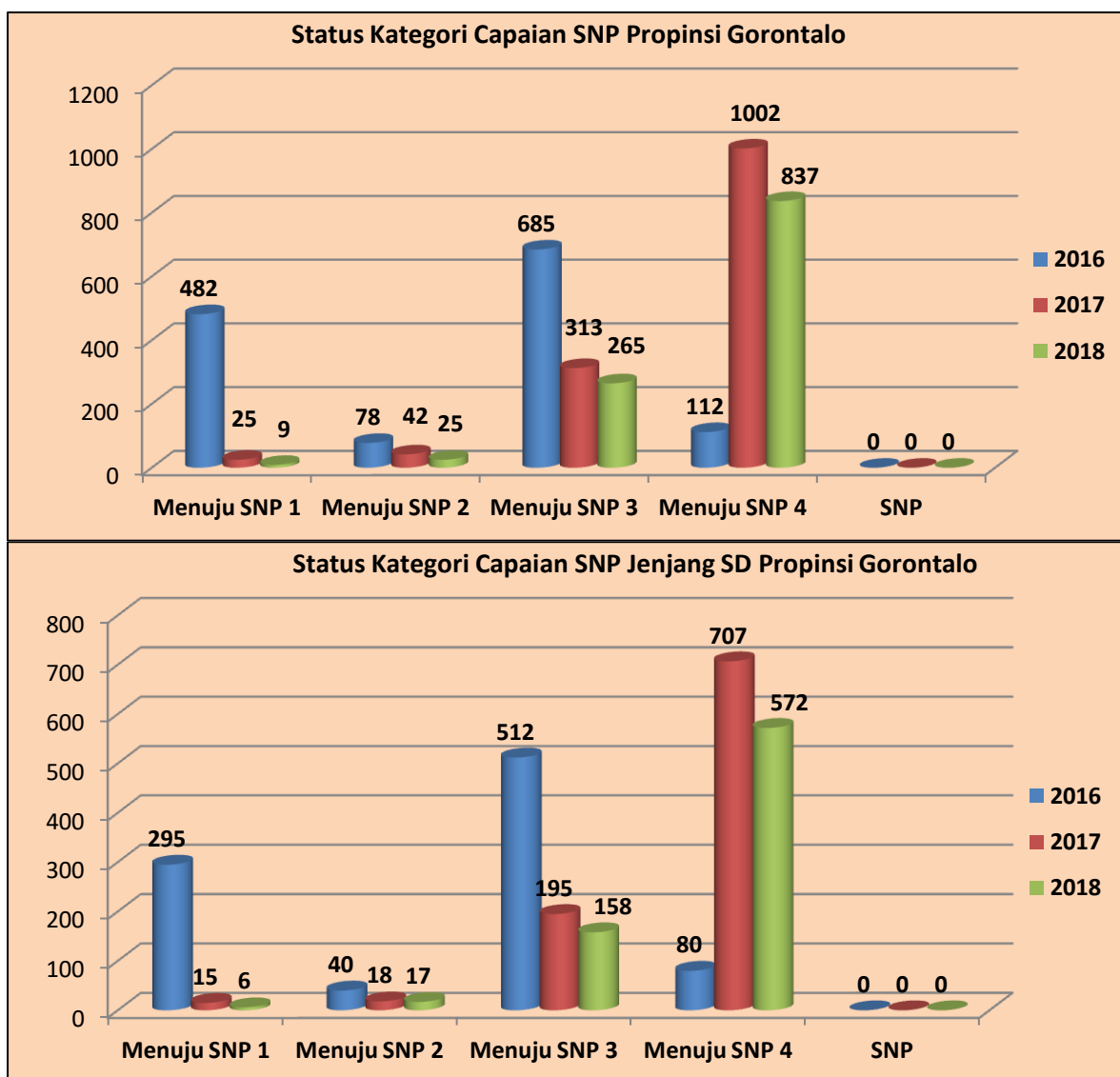


NamaKab/Kota	Satuan Pendidikan	Indeks	% Peningkatan
Kab. Gorontalo	SD	0.75	44.53%
	SMP	0.95	52.85%
	SMA	0.89	55.17%
	SMK	1.28	63.75%
Kab. Boalemo	SD	0.9	57.93%
	SMP	1.03	59.12%
	SMA	1.25	83.98%
	SMK	0.5	21.47%
Kab. Pohuwato	SD	1.09	64.73%
	SMP	1.26	80%
	SMA	0.58	34.30%
	SMK	1.26	89.45%
Kab. Bone Bolango	SD	0.85	52.97%
	SMP	0.79	40.95%
	SMA	1.18	66.15%
	SMK	1.04	46.58%
Kota Gorontalo	SD	0.72	46.83%
	SMP	1.01	62.04%
	SMA	0.53	25.42%
	SMK	0.85	40.93%
Kab. Gorontalo Utara	SD	0.64	34.51%
	SMP	0.59	29.61%

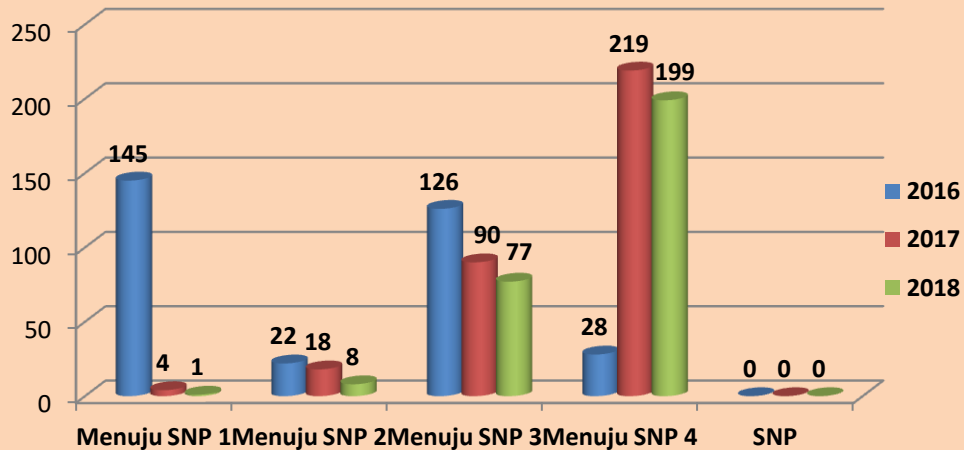
SMA	0.56	28.36%
SMK	0.29	13%
RATA - RATA	0.87	50%

PETA MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2016, 2017 dan 2018 PROPINSI GORONTALO

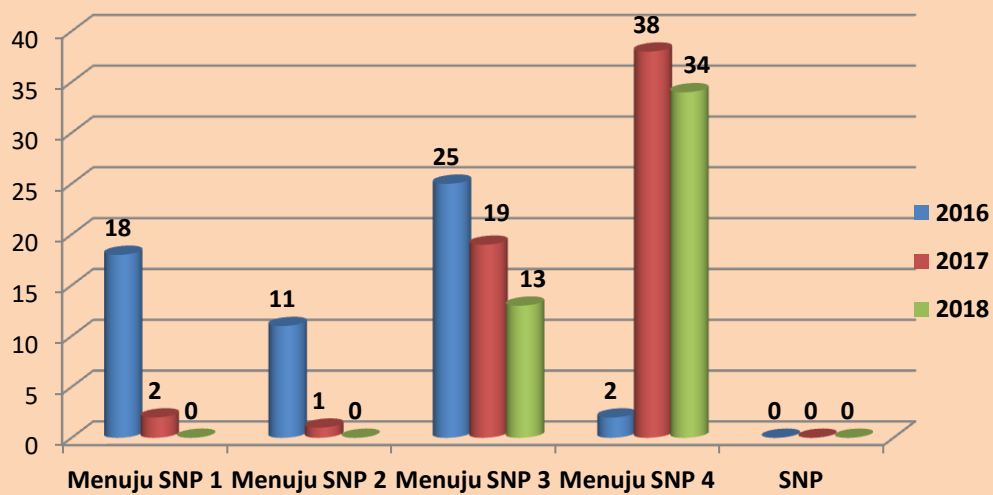
A. Status Kategori Capaian Mutu Sekolah



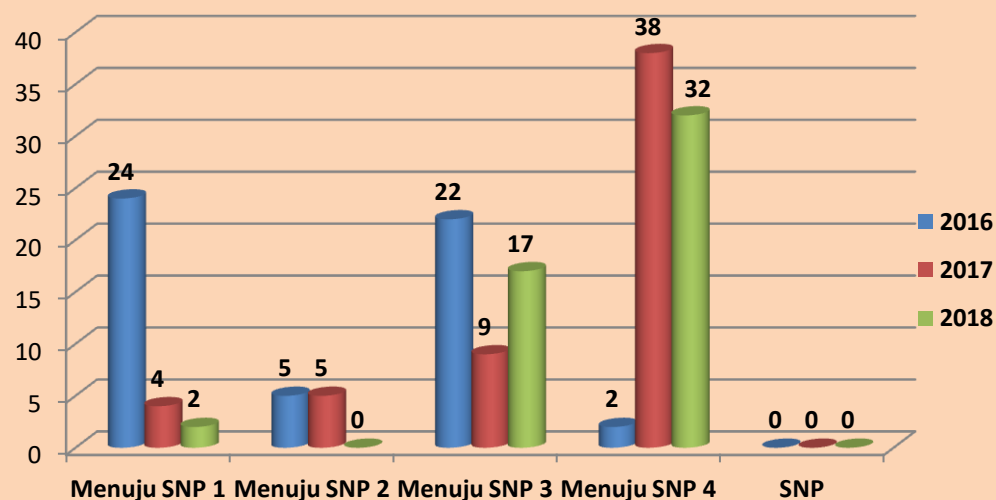
Status Kategori Capaian SNP Jenjang SMP Propinsi Gorontalo



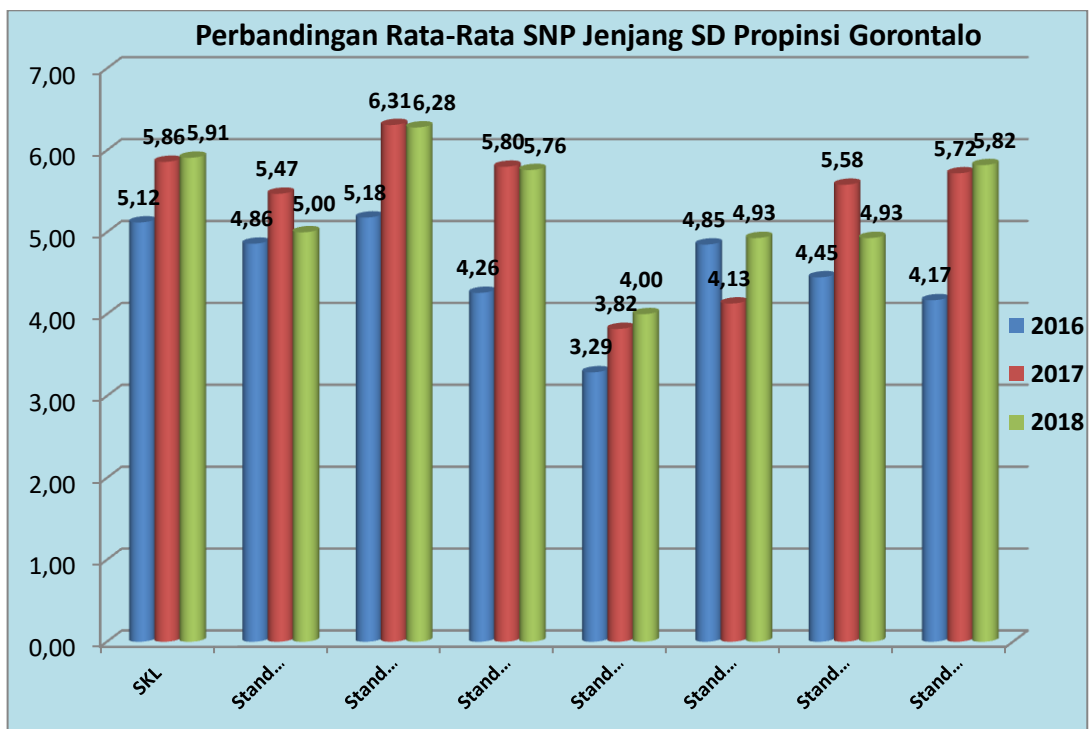
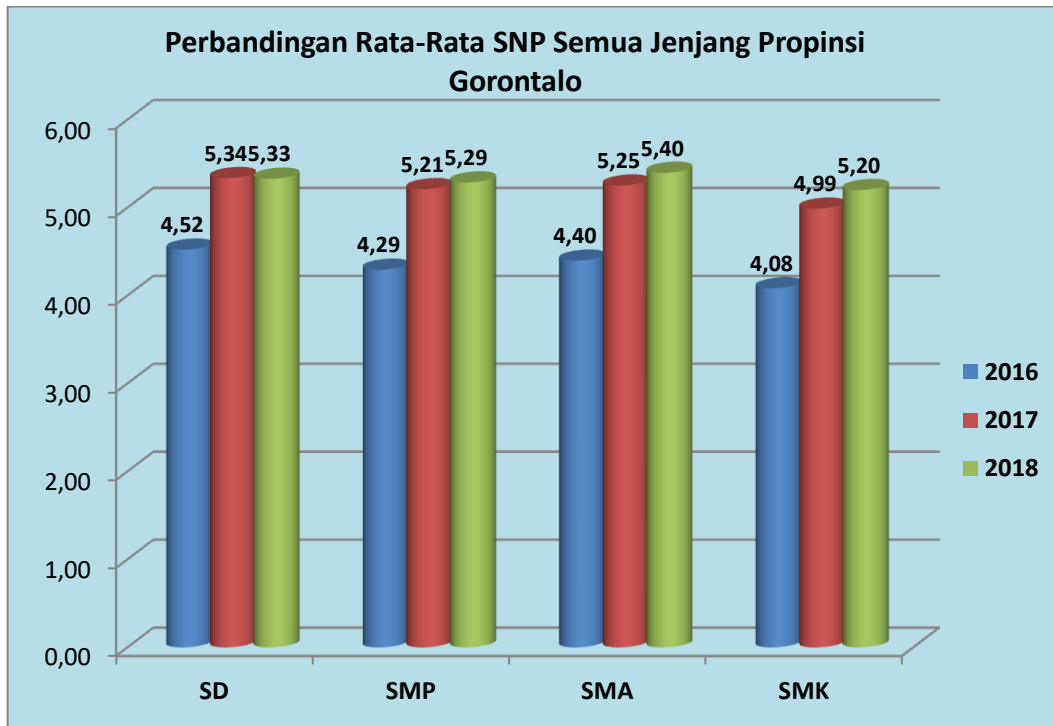
Status Kategori Capaian SNP Jenjang SMA Propinsi Gorontalo

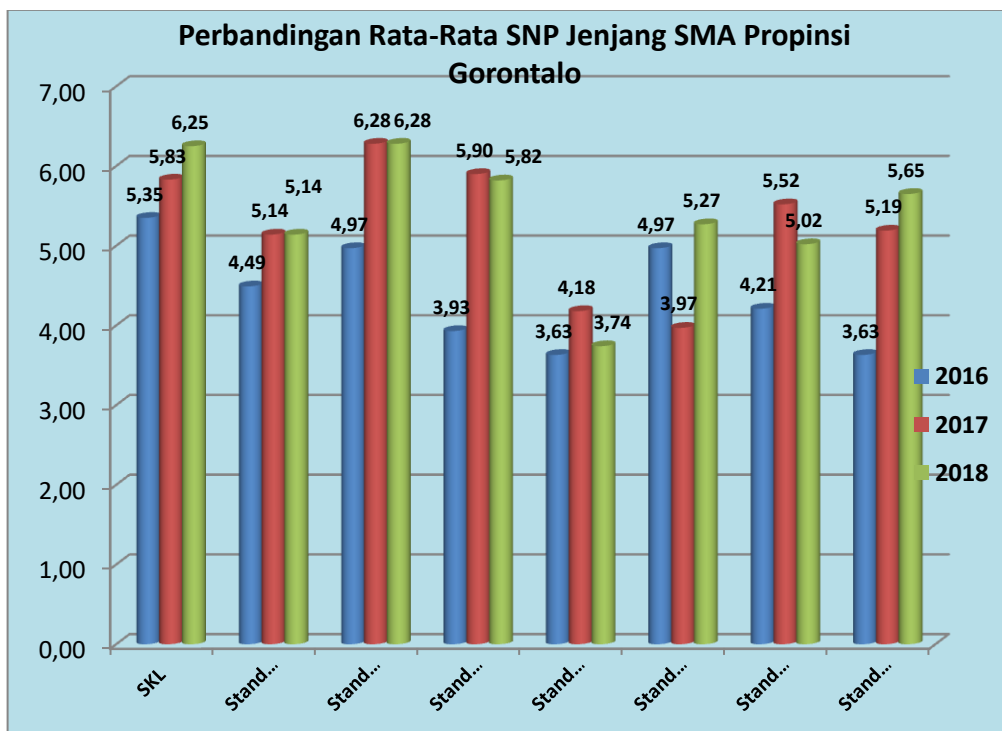
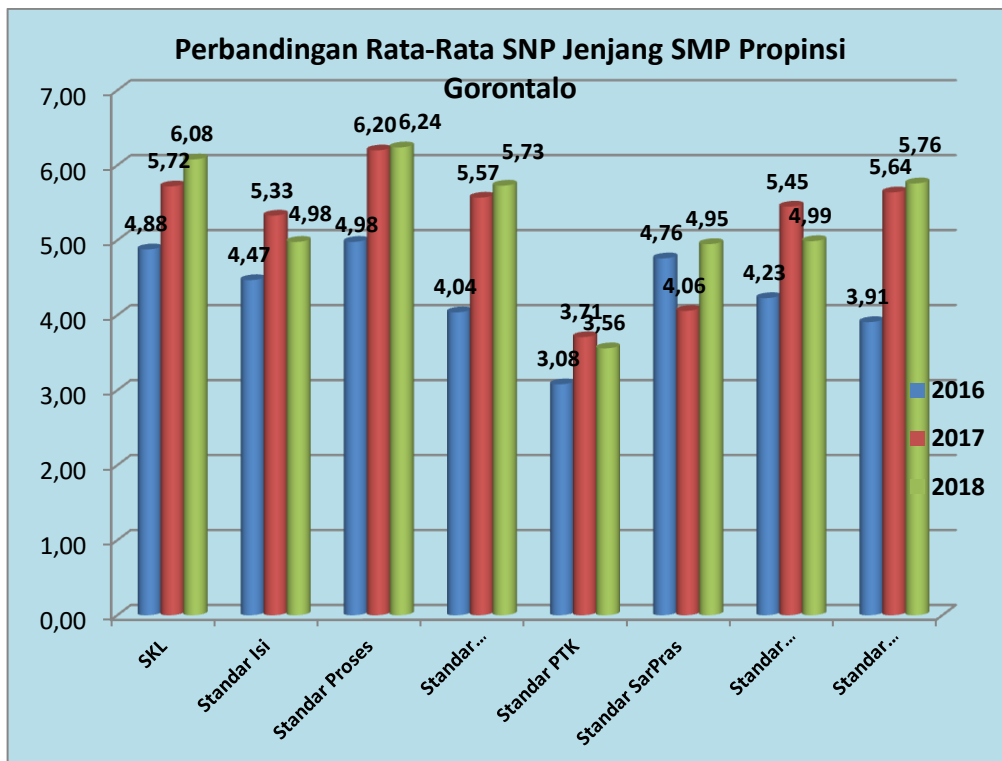


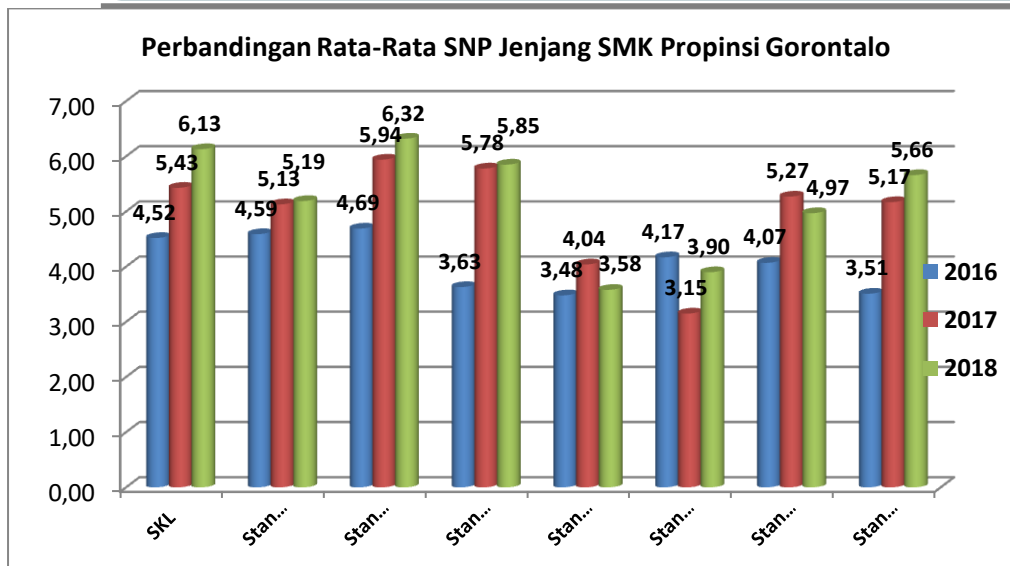
Status Kategori Capaian SNP Jenjang SMK Propinsi Gorontalo



B. Perbandingan Capaian Mutu Thn 2016, 2017, 2018







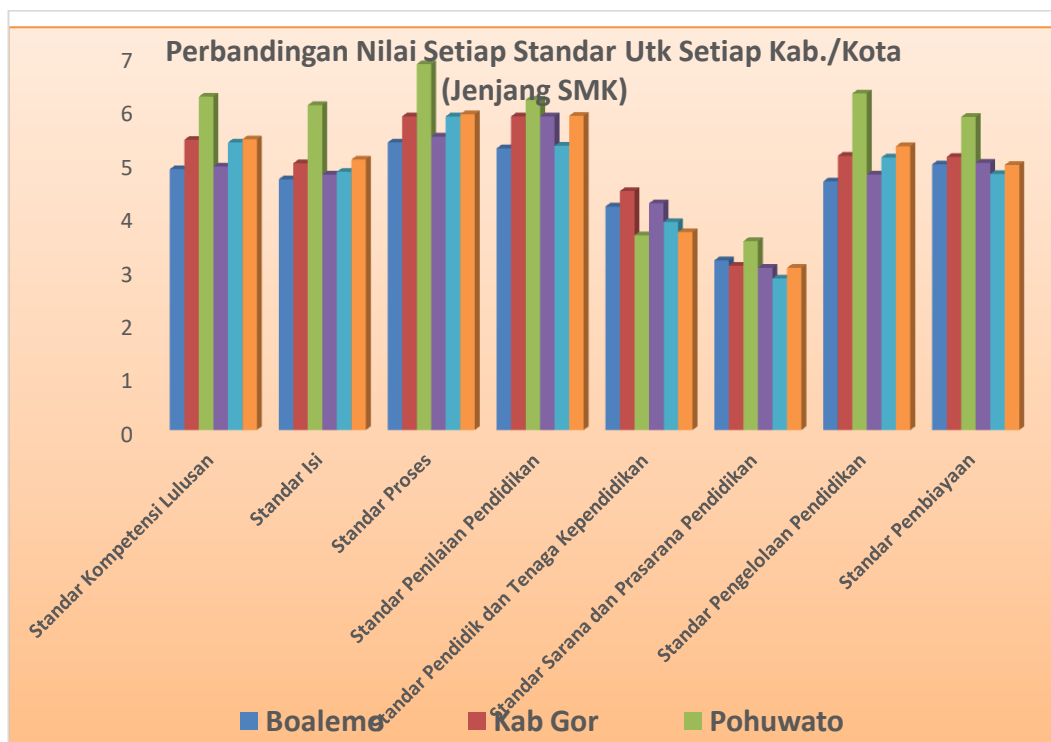
C. Pencapaian Terendah dari SNP

INDIKATOR - INDIKATOR TERENDAH		NILAI SNP	JlhSek. M1	JlhSek. M2	JlhSek. M3	JlhSe k. M4	JlhSe k. SNP
5	STANDAR PTK						
5.1.1.	Kualifikasi Guru minimal S1/D4	4,89	33	126	211	310	84
5.1.3.	Ketersediaan guru PJOK dan PAI	4,19	160	294	0	0	310
5.1.4.	Guru memilikisertifikatpendidik	4,19	98	192	231	174	69
5.1.5.	Guru memilikikompetensipedagogik minimal baik	4,09	12	120	613	19	0
5.1.7.	Guru memilikikompetensiprofesional minimal baik	4,43	12	22	648	82	0
5.2.1.	KualifikasiKepalaSekolah minimal S1/D4	4,41	283	0	0	0	481
5.2.5.	KepalaSekolahmemilikisertifikatpendidik	6,57	47	0	0	0	717
5.2.6.	KepalaSekolahmemilikisertifikatkepalasekola h	3,92	336	0	0	0	428
5.2.8.	KepalaSekolahmemilikikompetensimanajerial minimal baik	2,86	243	178	240	95	8
5.2.10.	KepalaSekolahmemilikikompetensisupervisi minimal baik	2,17	347	248	121	47	1
5.3.4.	SekolahmemilikiTenagaPelaksanaUrusanAd ministrasi (TAS)	2,36	506	0	0	0	258
5.3.5.	SekolahmemilikiTenagaPelaksanaUrusanAd ministrasi (TAS) berpendidikanseuaiketentuan	2,04	541	0	0	0	223
5.5.5.	SekolahmemilikiTenagaPustakawan	0,47	713	0	0	0	51
5.5.6.	SekolahmemilikiTenagaPustakawanberpendi dikansesuaiketentuan	0,50	709	0	0	0	55
6	STANDAR SARANA PRASARANA						
6.1.2.	Rasioluaslahansekolahsesuaidenganjumlahsi swa	6,88	36	17	17	14	680
6.1.4.	Rasioluasbangunansekolahsesuaidenganjum lahsiswa	3,44	57	668	0	1	38
6.2.3.	Ruangperpustakaansesuaistandar	2,40	243	402	117	2	0
6.2.12.	Ruangperpustakaanlayakpakai	0,00	764	0	0	0	0
6.2.4.	Tempatbermain/lapangansesuaistandar	0,00	764	0	0	0	0
6.2.10.	Kondisiruangkelaslayakpakai	5,30	18	27	366	210	143
6.3.1.	Memilikiruangpimpinansesuaistandar	0,97	578	180	6	0	0

6.3.14.	Kondisiruangpimpinanlayakpakai	1,58	592	0	0	0	172
6.3.2.	Memilikiruang guru sesuaistandar	0,32	764	0	0	0	0
6.3.15.	Kondisiruang guru layakpakai	1,76	449	120	142	53	0
6.3.3.	Memilikiruang UKS sesuaistandar	0,76	557	207	0	0	0
6.3.16.	Kondisiruang UKS layakpakai	2,34	492	65	83	89	35
6.3.4.	Memilikitempatibadahsesuaistandar	0,13	736	28	0	0	0
6.3.17.	Kondisitempatibadahlayakpakai	0,52	675	65	0	0	24
6.3.5.	Memilikijambansesuaistandar	3,21	148	387	117	112	0
6.3.18.	Kondisijambansesuaistandar	3,69	37	329	321	1	76
6.3.6.	Memilikigudangesuaistandar	0,15	756	8	0	0	0
6.3.8.	Memilikiruangtatausahasesuaistandar	0,00	764	0	0	0	0
6.3.21.	Kondisiruangtatausahalayakpakai	0,00	764	0	0	0	0

D. Data Kualifikasi Guru

Kab./Kota	Jlh Guru Belum S1 (SD)	Jlh Guru Belum S1 (SMP)	Jlh Guru Belum S1 (SMA)	Jlh Guru Belum S1 (SMK)	tal Jlh Guru Belum S1
b. Boalemo					
b. Gorontalo	0				2
b. Pohuwato					
b. Bone Bolango					
b. Gorontalo Utara					
ta Gorontalo	6				5
mlah	4	7			4
mlahKeseluruhan Guru					852
rsentase Guru Belum S1					6



Hasil Pengukuran Indeks Efektivitas Satuan Pendidikan (2016 -2017)

Berdasarkan data hasil pemetaan mutu Tahun 2016 dengan data pemetaan mutu Tahun 2018 dapat dilihat indeks efektivitas mutu sekolah dilihat dari perubahan rerata capaian SNP dari Tahun 2016 dengan rerata capaian SNP Tahun 2018 sebagaiberikut:

NamaKab/Kota	SatuanPendidikan	Indeks	% Peningkatan
Kab. Gorontalo	SD	0.75	44.53%
	SMP	0.95	52.85%
	SMA	0.89	55.17%
	SMK	1.28	63.75%
Kab. Boalemo	SD	0.9	57.93%
	SMP	1.03	59.12%
	SMA	1.25	83.98%
	SMK	0.5	21.47%
Kab. Pohuwato	SD	1.09	64.73%
	SMP	1.26	80%
	SMA	0.58	34.30%
	SMK	1.26	89.45%
Kab. Bone Bolango	SD	0.85	52.97%
	SMP	0.79	40.95%
	SMA	1.18	66.15%
	SMK	1.04	46.58%
Kota Gorontalo	SD	0.72	46.83%
	SMP	1.01	62.04%
	SMA	0.53	25.42%

	SMK	0.85	40.93%
Kab. Gorontalo Utara	SD	0.64	34.51%
	SMP	0.59	29.61%
	SMA	0.56	28.36%
	SMK	0.29	13%
RATA - RATA		0.87	50%

Diagram 3.2. Perbandingan Rerata capaian SNP 2016 - 2017

Kesimpulan dari rerata capaian SNP:

SNP(2016-2018)	SD	SMP	SMA	SMK
standar kompetensi lulusan	naik	naik	naik	naik
standar isi	naik	naik	naik	naik
standar proses	naik	naik	naik	naik
standar penilaian	naik	naik	naik	naik
standar pengelolaan	naik	naik	naik	naik
standar pembiayaan	naik	naik	naik	naik
standar PTK	turun	turun	turun	turun
standar sarana dan prasarana	turun	turun	turun	turun

Penurunan capaian standar disebabkan karena untuk standar sarana dan prasarana dan standar PTK sumber datanya diambil dari data dapodik dan ternyata mayoritas operator dapodik belum menginput nya sehingga nilainya menjadi rendah.

Kesimpulan dari sebaran mutu:

Peningkatan status mutu sekolah dapat dijelaskan melalui tabel-tabel

berikut:

Perbandingan jumlah sekolah per kategori pada jenjang SD

a. Kota Gorontalo

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	22	18.96 %	99	85.34 %
3	Menuju SNP 3	82	70.68 %	17	14.65 %
4	Menuju SNP 2	3	2.59 %	0	0 %
5	Menuju SNP 1	9	7.75 %	0	0 %
Jumlah		116	100 %	116	100 %

b. Kabupaten Gorontalo

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	34	11.6 %	233	79.52 %
3	Menuju SNP 3	178	60.75 %	48	16.38 %
4	Menuju SNP 2	13	4.43 %	7	3.39 %
5	Menuju SNP 1	63	21.50 %	5	1.71 %
Jumlah		293	100 %	293	100 %

c. Kabupaten Boalemo

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	8	6.01%	113	84.32 %
3	Menuju SNP 3	42	31.57 %	19	14.18 %
4	Menuju SNP 2	2	1.50 %	1	0.7 %
5	Menuju SNP 1	80	60.15 %	1	0.7%
Jumlah		133	100%	134	100%

d. Kabupaten Pohuwato

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	1	0.8%	98	77.16 %
3	Menuju SNP 3	62	49.21 %	23	18.11 %
4	Menuju SNP 2	13	10.32 %	4	3.15 %
5	Menuju SNP 1	50	39.68 %	2	1.57%
Jumlah		126	100%	127	100%

e. Kabupaten Bone Bolango

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	8	6.15%	109	83.84 %
3	Menuju SNP 3	66	50.76 %	19	14.61 %
4	Menuju SNP 2	0	0%	0	0 %
5	Menuju SNP 1	55	42.31 %	2	1.54 %
Jumlah		130	100%	130	100%

f. Kabupaten Gorontalo Utara

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
----	-------------	------------------------------	---	------------------------------	---

1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	6	4.4%	98	72.59 %
3	Menuju SNP 3	79	58.52 %	28	20.74 %
4	Menuju SNP 2	5	3.7%	5	3.7 %
5	Menuju SNP 1	41	30.37 %	4	2.96 %
Jumlah		135	100%	135	100%

Perbandingan jumlah sekolah per kategori pada jenjang SMP
Kota Gorontalo

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2018	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	3	14.28 %	17	80.95 %
3	Menuju SNP 3	10	47.62 %	4	19.05%
4	Menuju SNP 2	2	9.52%	1	4.8 %
5	Menuju SNP 1	6	28.57 %	0	0 %
Jumlah		21	100%	22	100%

Kabupaten Gorontalo

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2018	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	11	8.52 %	96	75.6 %
3	Menuju SNP 3	49	37.98 %	23	18.11 %
4	Menuju SNP 2	9	6.9%	7	5.5 %
5	Menuju SNP 1	59	45.73 %	3	2.4 %
Jumlah		129	100%	127	100%

Kabupaten Boalemo

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2018	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	5	0.01 %	41	75.92 %
3	Menuju SNP 3	9	16.98 %	10	18.52 %
4	Menuju SNP 2	3	5.66 %	3	5.55 %

5	Menuju SNP 1	35	66.04 %	0	0 %
Jumlah		53	100%	54	100%

Kabupaten Pohuwato

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	3	7.14 %	34	80.95 %
3	Menuju SNP 3	17	40.47%	8	19.05%
4	Menuju SNP 2	3	7.14 %	0	0 %
5	Menuju SNP 1	17	40.76 %	0	0 %
Jumlah		42	100%	42	100%

Kabupaten Bone Bolango

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	3	8.57 %	25	71.42 %
3	Menuju SNP 3	6	17.14 %	10	28.57 %
4	Menuju SNP 2	1	2.85 %	2	5.7 %
5	Menuju SNP 1	24	68.57 %	1	2.85 %
Jumlah		35	100%	35	100%

Kabupaten Gorontalo Utara

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	3	3,54 %	30	65.21 %
3	Menuju SNP 3	35	77,72 %	11	23.91 %
4	Menuju SNP 2	1	3,82 %	5	10.86 %
5	Menuju SNP 1	7	14,91 %	0	0 %
Jumlah		46	100%	46	100%

Perbandingan jumlah sekolah per kategori pada jenjang SMA

a. Kota Gorontalo

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	0	0 %	2	28.57 %
3	Menuju SNP 3	5	71.42 %	5	71.42 %
4	Menuju SNP 2	0	0 %	0	0 %
5	Menuju SNP 1	1	14.28 %	0	0 %
Jumlah		7	100 %	7	100 %

b. Kabupaten Gorontalo

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	0	0 %	13	72.22 %
3	Menuju SNP 3	5	27.77 %	4	22.22 %
4	Menuju SNP 2	0	0 %	1	5.55 %
5	Menuju SNP 1	10	55.55 %	0	0 %
Jumlah		18	100 %	18	100 %

c. Kabupaten Boalemo

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	0	0 %	7	77.77 %
3	Menuju SNP 3	5	55.55 %	2	22.22 %
4	Menuju SNP 2	0	0 %	0	0 %
5	Menuju SNP 1	4	44.44 %	0	0 %
Jumlah		9	100 %	9	100 %

d. Kabupaten Pohuwato

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2018	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	2	28.57 %	0	0 %
3	Menuju SNP 3	4	57.14 %	25	57.14 %

4	Menuju SNP 2	0	0 %	0	0 %
5	Menuju SNP 1	0	0 %	0	0 %
Jumlah		7	100 %	7	100 %

e. Kabupaten Bone Bolango

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	0	0 %	7	77.77 %
3	Menuju SNP 3	2	22.22 %	1	11.11 %
4	Menuju SNP 2	1	11.11 %	0	0 %
5	Menuju SNP 1	6	66.66 %	1	11.11 %
Jumlah		9	100 %	9	100 %

f. Kabupaten Gorontalo Utara

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	0	0 %	7	63.63 %
3	Menuju SNP 3	4	36.36 %	3	27.27 %
4	Menuju SNP 2	0	0 %	0	0 %
5	Menuju SNP 1	7	63.63 %	1	9.09 %
Jumlah		11	100 %	11	100 %

Perbandingan jumlah sekolah per kategori pada jenjang SMK

a. Kota Gorontalo

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	1	0.10 %	6	0.60 %
3	Menuju SNP 3	3	0.30 %	3	0.30 %
4	Menuju SNP 2	1	0.10 %	0	0 %
5	Menuju SNP 1	3	0.30 %	1	0.10 %
Jumlah		10	100 %	10	100 %

b. Kabupaten Gorontalo

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	0	2,04 %	8	72,9 %
3	Menuju SNP 3	3	73,25 %	2	25 %
4	Menuju SNP 2	1	7,33 %	1	1,4 %
5	Menuju SNP 1	8	17,38 %	1	0,7 %
	Jumlah	12	100 %	12	100 %

c. Kabupaten Boalemo

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2018	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	12	2,04 %	416	72.85 %
3	Menuju SNP 3	430	73,25 %	143	25.04 %
4	Menuju SNP 2	43	7,33 %	8	1.40 %
5	Menuju SNP 1	102	17,38 %	4	0.70%
	Jumlah	571	100 %	571	100 %

d. Kabupaten Pohuwato

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2018	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	1	9.09 %	11	100%
3	Menuju SNP 3	5	45.45 %	0	0 %
4	Menuju SNP 2	1	9.09 %	0	0%
5	Menuju SNP 1	3	27.27%	0	0%
	Jumlah	11	100 %	11	100 %

e. Kabupaten Bone Bolango

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2017	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	0	0 %	5	71.42 %
3	Menuju SNP 3	3	42.85 %	1	14.28%

4	Menuju SNP 2	1	14.28 %	0	0 %
5	Menuju SNP 1	3	42.85 %	1	14.28%
Jumlah		7	100 %	7	100%

f. Kabupaten Gorontalo Utara

No	Status Mutu	Jumlah Sekolah Tahun 2016	%	Jumlah Sekolah Tahun 2018	%
1	Memenuhi SNP	0	0 %	0	0 %
2	Menuju SNP 4	0	0 %	3	50%
3	Menuju SNP 3	2	33.33 %	2	33.33 %
4	Menuju SNP 2	0	0 %	1	16.66 %
5	Menuju SNP 1	4	66.66 %	0	0%
Jumlah		6	100 %	6	100%

Catatan penting terkait kegiatan pemetaan mutu pendidikan adalah adanya perbedaan data jumlah sekolah yang menyebabkan realisasi kegiatan ini tidak dapat mencapai target 100%. Berikut rincian perbedaan data jumlah satuan pendidikan per jenjang:

JENJANG	PROVINSI	BOALEMO	GORONTALO UTARA	KOTA GORONTALO	KAB. POHUWATO	KAB. GORONTALO	KAB. BONE BOLANGO
Jlh sek. Yg data pemetaannya terekam	1365	206	197	154	185	444	179
Jlh Seluruh Sek.	1,381	207	198	155	187	450	184
Persentase	98,84%	99,52%	99,49%	99,35%	98,93%	98,67%	97,28%

Realisasi rencana aksi atas pelaksanaan kegiatan pemetaan mutu pendidikan :

1. Sosialisasi Penjaminan Mutu.

Tujuan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan adalah agar para pelaku pendidikan memahami tujuan, mengapa, bagaimana, dan seperti apa siklus penjaminan mutu diterapkan sehingga terjadi peningkatan mutu pada satuan pendidikan secara berkelanjutan. Lima langkah dalam siklus penjaminan mutu pendidikan meliputi: pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan, pelaksanaan pemenuhan, evaluasi/audit mutu, dan penyusunan standar baru.

2. Rapat Koordinasi Zonasi Mutu

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan agar terlaksanasistem penjaminan mutu internal pendidikan melalui implementasi pemetaan mutu di tingkat satuan pendidikan seluruh jenjang dengan aplikasi PMP. Rekomendasi perbaikan dari pelaksanaan pemetaan mutu adalah waktu pelaksanaan pemetaan mutu akan lebih efektif jika dilakukan sebelum tahun ajaran baru;

3. Bimbingan Teknis Pengawas

Kegiatan ini bertujuan Pelatihan pengawas sekolah merupakan pelatihan untuk menyiapkan pengawas sekolah agar mampu: 1) Menjelaskan instrumen pengumpulan data mutu pendidikan kepada satuan pendidikan; 2) Berinteraksi dengan responden pengumpulan data mutu pendidikan; 3) Melakukan verifikasi dan validasi data mutu pendidikan, dan 4) Memandu proses pengisian data ke aplikasi Penjaminan Mutu Pendidikan yang terintegrasi kedalam aplikasi Dapodik. Pengawas sekolah dan operator sekolah yang mengikuti pelatihan ini diharapkan dapat menjamin akuntabilitas pengumpulan dan kredibilitas data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di sekolah.

4. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan data mutu pendidikan sesuai dengan SNP di seluruh sekolah di Indonesia. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah tersedianya data mutu pendidikan di sekolah yang akurat dan berbasis pada fakta dan dokumentasi data mutu di sekolah.

Pengawas sekolah yang sudah mengikuti Bimbingan Teknis Pengawas Sekolah dan Petugas Pemetaan Mutu berkewajiban mengunjungi dan mendampingi proses pengisian data mutu pendidikan pada aplikasi PMP yang

terintegrasi Dapodik di 10 satuan pendidikan di kab/kota yang menjadi sekolah binaannya. Dengan demikian, akan terjaring data mutu pendidikan di 1832 satuan pendidikan di Provinsi Gorontalo.

5. Verifikasi dan Validasi

Verifikasi dan validasi data oleh pengawas dilakukan untuk menjamin data yang diperoleh adalah data yang akurat dan sesuai dengan kondisi nyata di sekolah. Mekanisme verifikasi dan validasi oleh pengawas sekolah dilakukan dalam 6 tahap yaitu: 1) Pengawas meneliti setiap instrumen satu persatu; 2) Pengawas memberi tanda pada instrumen yang tidak lengkap dan validitas datanya diragukan; 3) Pengawas memberi catatan diatas semua instrumen yang belum lengkap atau validitas datanya diragukan; 4) Instrumen yang belum lengkap dan validitas datanya diragukan yang telah diberi catatan dikembalikan ke sekolah untuk dilengkapi atau diperbaiki; 5) Pengawas melakukan pengecekan kembali hasil pengisian oleh personel sekolah; dan 6) Pengawas mengisi kuesioner pengawas sekolah sesuai dengan kondisi sebenarnya di sekolah sebagai materi pengecekan isian sekolah.

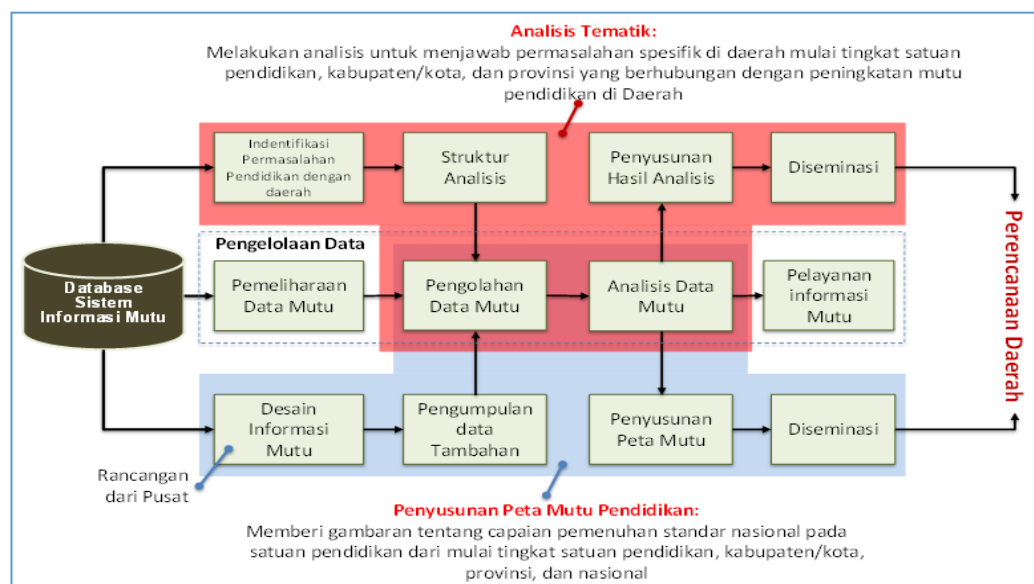
6. Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu

Penyusunan peta mutu dilakukan untuk memperoleh data peta mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan menyusun rekomendasi rencana pemenuhan mutu bagi daerah sesuai dengan model yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjaga adanya standarisasi dalam penyusunan peta mutu dan rencana mutu pendidikan di daerah. Hasil dari kegiatan ini adalah : 1) Tersusunnya peta mutu pendidikan dan rencana peningkatan mutu pendidikan; 2) Tersusunnya mekanisme pelaksanaan penyusunan peta mutu dan penyusunan rencana peningkatan mutu pendidikan (persiapan, pelatihan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi); 3) Pengolahan dan analisis data.

7. Analis Data Mutu

Kegiatan ini dilakukan untuk mengolah, menganalisis dan menyusun peta mutu pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan persiapan penyusunan peta mutu pendidikan, yang dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti pemerintah.

Alur kegiatan pemetaan mutu pendidikan di satuan pendidikan Provinsi Gorontalo dapat digambarkan dengan infografis berikut ini:



Gambar 3.1. Infografis Pemetaan Mutu Pendidikan

b. Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan berbasis SNP

1. Implementasi Kurikulum 2013(K13)

Pelaksanaan Bimtek K13 di Provinsi Gorontalo dapat digambarkan dengan infografis berikut ini:



Gambar 3.2. Infografis Implementasi K13

Rangkaian kegiatan Implementasi K13 dilakukan dengan tahapan rekrutmen Instruktur Kabupaten/ Kota (IK); BimtekIK; Bimtek Guru Sekolah Sasaran; hingga Pelaksanaan Pendampingan di Sekolah Sasaran.

Berikut ini adalah data jumlah sekolah yang menjadi pelaksana K13 di Provinsi Gorontalo:

PROGRAM K-13 - 2018
JUMLAH SEKOLAH YANG SUDAH MELAKSANAKAN KURIKULUM 2013

Jenjang	Jumlah Sekolah Yang Sudah Melaksanakan K13				JUMLAH
	Sekolah K13 Tahun 2015	Sekolah K13 Tahun 2016	Sekolah K13 Tahun 2017	Sekolah K13 Tahun 2018	
	6%	19%	35%	40%	
SD	45	187	324	376	932
SMP	36	44	112	139	331
SMA	13	8	20	20	61
SMK	6	10	18	21	55
JUMLAH	100	249	474	556	1379

Tabel 3.3. Sekolah Pelaksana K13 tahun 2015 - 2018



Realisasi rencana aksi atas pelaksanaan kegiatan Implementasi K13 :

1. Fasilitasi melalui Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten/Kota Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK

Kegiatan ini bertujuan menyiapkan instruktur kabupaten/kota yang siap memfasilitasi Pelatihan Guru Sasaran, dan menyiapkan tim pendamping untuk memfasilitasi Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 di sekolah sasaran;

2. Fasilitasi melalui Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 Bagi Guru Sasaran Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK

Kegiatan dilaksanakan di Tempat Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo sejumlah 376 SD, 139 SMP, 20 SMA dan 21 SMK. Dana kegiatan disalurkan ke TPK K13 dalam bentuk Swakelola.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi guru kelas 1 SD, guru kelas 4 SD, guru mata pelajaran Kelas VII SMP, guru mata pelajaran Kelas X SMA dan SMK dalam menyusun RPP, menyusun instrumen penilaian, melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, *problem-based learning*, *project-based learning*, dan *discovery learning* dengan integrasi penumbuhan budi pekerti, literasi serta melaksanakan dan mengelola hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

2. Sekolah Model yang difasilitasi

Hasil dari kegiatan pendampingan sekolah model yaitu sekolah secara bertahap mampu mengimplementasikan siklus SPMI mulai dari pemetaan mutu, perencanaan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, monev pemenuhan mutu dan penetapan strategi baru.

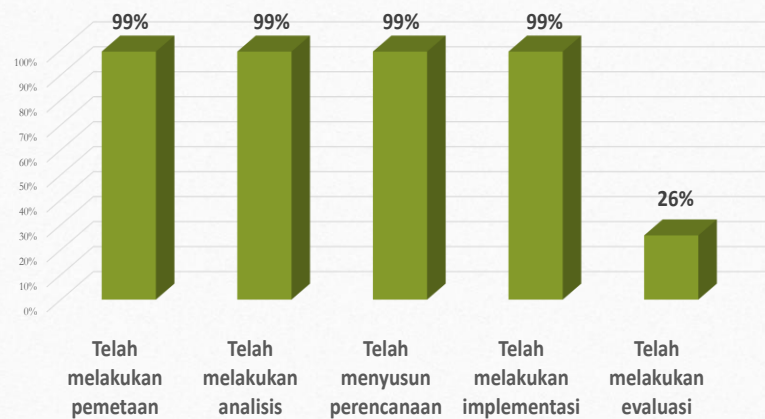
Jumlah Sekolah Model Sasaran Evaluasi

Jenjang	Kab. Bone Bolango	Kota Gorontalo	Kab. Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Kab. Boalemo	Kab. Pohuwato	Jumlah
SD	11	11	11	11	11	11	66
SMP	6	6	6	6	6	6	36
SMA	4	4	4	4	4	4	24
SMK	3	3	3	3	3	3	18
Jumlah	24	24	24	24	24	24	144

Jumlah Sekolah Model Sasaran Evaluasi

Sekolah Model	Jumlah
Sekolah Model LPMP Thn 2016 - 2017	28
Sekolah Model Kemitraan (bersama Disdik Kab./Kota) Thn 2016 – Sekolah Model LPMP Thn 2017	9
Sekolah Model Baru Thn 2017	107
Total	144

Pelaksanaan SPMI di Sekolah Model



Catatan : 1 sekolah tidak melaksanakan SPMI karena tidak memanfaatkan dana BanPer, dan telah mengembalikan dana tersebut (SMK 1 Batudaa)



Mengawali kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP Gorontalo melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo yang dihadiri oleh pejabat-pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo



Realisasi rencana aksi atas pelaksanaan kegiatan supervisi dan fasilitasi pencapaian SNP di Sekolah Model PMP:

1. Pelatihan Fasilitator Daerah Sekolah Model

Kegiatan ini bertujuan menyiapkan pendamping di sekolah binaan sehingga pelaksanaan sekolah model dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dan sekolah bisa mengimplementasikan SPMI secara mandiri;



2. **Pendampingan Sekolah Model**
Kegiatan pendampingan dilakukan untuk menguatkan dan membina sekolah model agar dapat mengimplementasikan SPMI, media pengimbasan SPMI bagi sekolah imbas serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan SPMI di sekolah model. Pendamping sekolah model merupakan fasilitator daerah yang sebelumnya telah dibekali oleh LPMP. Agar pelaksanaan pendampingan di sekolah dapat dilaksanakan optimal sesuai dengan tujuan pendampingan perlu didukung oleh bantuan pemerintah dalam bentuk pembiayaan pendampingan pada tingkat sekolah. Jumlah sekolah model yang mendapatkan bantuan pemerintah sebanyak 144 sekolah.
3. **Workshop Fasilitator Daerah Sekolah Model**
Sasaran calon fasilitator daerah diambil dari kalangan internal LPMP yang meliputi widyaiswara, tenaga fungsional, maupun staf teknis yang dipandang layak. Jumlah calon Fasda sebanyak 51 orang, dengan pola pelatihan 20 JP, 3 hari, menginap diluar kota. Bimtek fasilitator daerah akan dilaksanakan dalam rentang waktu Februari – Maret 2017.
4. **Monitoring dan Evaluasi**
Monitoring dilakukan dalam setiap rangkaian kegiatan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan output kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Monev dilakukan pada bulan November 2017

Sekolah yang difasilitasi melalui kemitraan

5. **Bimbingan Teknis SPME**
Manfaat dari kegiatan ini adalah TPMS sekolah dapat melaksanakan tahapan implementasi SPMI di sekolah masing-masing;
6. **Monitoring Dan Evaluasi**
Manfaat dari kegiatan ini adalah sekolah model mampu melaksanakan seluruh tahapan implementasi SPMI, dan setelah kegiatan dapat menyusun laporan penggunaan dana bantuan pemerintahnya;

Kendala Pelaksanaan SPMI

Kendala Implementasi Pemenuhan Mutu

- Kurangnya kuantitas dan kualitas PTK
- Kurangnya sarana dan prasarana sekolah
- Sulit menghadirkan pemateri (dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru)
- Kurangnya dana / anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan
- Kurangnya waktu karena padatnya kegiatan sekolah, baik kegiatan akademik maupun kegiatan seremonial daerah
- Terbatasnya waktu untuk implementasi disebabkan guru sibuk dengan tugas pokoknya yakni menjalankan proses belajar mengajar
- Menjaga komitmen seluruh unsur (Kepala Sekolah, Guru, Siswa) dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya
- Kurangnya koordinasi dari Kepala Sekolah diakibatkan oleh tingginya tingkat kesibukan Kepala Sekolah

Kendala Pelaksanaan SPMI

Kendala Evaluasi Implementasi Pemenuhan Mutu

- Sulit dalam penentuan indikator evaluasi terutama indikator output dan outcome
- Sulit mengukur ketercapaian outcome karena memerlukan waktu
- Tidak paham cara mengevaluasi
- Kurangnya waktu untuk melakukan evaluasi karena padatnya kegiatan sekolah, baik kegiatan akademik maupun kegiatan seremonial daerah
- Terbatasnya waktu untuk evaluasi disebabkan guru sibuk dengan tugas pokoknya yakni menjalankan proses belajar mengajar

7. Diseminasi Pemetaan Mutu dan Seminar Hasil SPME

Dampak dari kegiatan ini adalah program SPMI diimplementasikan di sekolah model maupun sekolah imbas dengan baik sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan;



Deskripsi Capaian Output

Uraian tentang capaian output yang disajikan pada bagian ini untuk melengkapi informasi capaian kinerja dari indikator yang tidak termuat dalam Perjanjian Kinerja, yakni dukungan kelembagaan. Berikut ini adalah deskripsi capaian dari masing-masing indikator dukungan kelembagaan:

a. Pengolahan sistem informasi

Realisasi rencana aksi atas pelaksanaan pengolahan sistem informasi meliputi kegiatan pengolahan data dan publikasi hasil analisis data. Kegiatan-kegiatan tersebut antarlain:

1. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Pada kegiatan ini dilakukan sinkronisasi data baik secara internal maupun eksternal dengan pihak-pihak terkait sehingga didapatkan informasi untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Gorontalo.



1. Workshop Verifikasi dan Validasi Pemenuhan Kebutuhan data dan Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2018

Manfaat dari kegiatan workshop verifikasi dan validasi data pendidikan dan tenaga pendidikan (PTK) ini adalah data PTK yang diolah berdasarkan kualifikasi pendidikan, status kepegawaian, status sertifikasi dan jenis kelamin dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan akan data PTK tersebut.

2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Dan BMN Tahun 2018
3. Kegiatan Semarak Hardiknas





b. Tata kelola kelembagaan:

- Bimtek Manajemen ASN
- Pengembangan Kapasitas Pegawai LPMP
- Pengelolaan Ketatausahaan
- Bimtek Pengelolaan Keuangan Dan BMN
- Penyusunan Program Kerja Tahun 2019



➤ Implementasi SAKIP: Peningkatan Skor dan Penguatan SAKIP

Peningkatan Skor SAKIP berbasis Hasil Kertas Kerja Evaluasi (KKE)

- Perencanaan (30%) perbaikan yang perlu dilakukan:
 - Tujuan lembaga berorientasi hasil
 - Target Renstra dilakukan pemantauan
 - Penyusunan rencana aksi dari RKT
- Pengukuran (25%) perbaikan yang perlu dilakukan:
Indikator kinerja dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
- Pelaporan (15%) perbaikan yang perlu dilakukan:
 - Laporan kinerja menyajikan analisis dan evaluasi capaian kinerja
 - Laporan kinerja membandingkan capaian dari tahun sebelumnya
 - Informasi yang dituangkan dalam laporan kinerja digunakan untuk penilaian kinerja
- Evaluasi (10%) perbaikan yang perlu dilakukan:
Pemantauan rencana aksi dapat menunjukkan perbaikan di setiap periode
- Pencapaian Sasaran (20%) perbaikan yang perlu dilakukan:
Perumusan target output dan outcome pada setiap kegiatan utama yang dilaksanakan

Penguatan SAKIP

- Melakukan reviu Renstra 2015-2019
Reviu 1 Tahun 2018 sudah dilakukan untuk penyesuaian target RKT, indikator kinerja dan menambahkan sub-tansi kerjasama/kemitraan sesuai dengan fungsi LPMP



- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik
Pemantauan dilakukan setiap triwulan oleh setiap unit kerja dalam forum rapat maupun pengisian format pemantauan
- Mengembangkan sistem informasi online
Perlu penguatan rancangan sistem informasi online
 - *Sistemnya seperti apa*
 - *Informasi yang disistem online kan apa saja*
- Meningkatkan reliabilitas, validitas dan akuntabilitas laporan
Penyusunan laporan diarahkan pada laporan yang konsisten, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan
- Tepat waktu dalam penyampaian dokumen PK dan LAKIP
Penyampaian dokumen kelembagaan ditargetkan selalu tepat waktu
- Pembentukan Tim SAKIP
Direalisasikan dengan adanya Tim Kinerja, Tim Pemantauan, dan Tim SPI
- Penetapan kontrak kerja pada semua eselon s.d staf
Membangun komitmen bersama seluruh unit kerja untuk mencapai target kontrak kerja

Faktor Pendukung Dan Kendala Capaian Kinerja 2018

Pelaksanaan program Tahun 2018 yang telah dideskripsikan dalam capaian kinerja di atas memberikan informasi tentang bagaimana dan apa hasil dari keterlaksanaan program.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dan kendala/hambatan yang terjadi dalam memenuhi target indikator kinerja dideskripsikan pada tabel berikut ini:

No.	Bidang	Pendukung Keberhasilan	Kendala/Hambatan
1.	Pemetaan Mutu Pendidikan	Hubungan kerja sama antara LPMP Gorontalo dengan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo terjalin sangat baik	Jadwal pelaksanaan pemetaan mutu belum terukur tepat waktu
2.	Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	Kematangan dalam mendisain program fasilitasi yang tepat manfaat, baik yang terkait Implementasi K13 maupun	Penetapan target sasaran pemetaan mutu belum sesuai dengan data riil di Provinsi Gorontalo

C. Realisasi Anggaran

Deskripsi realisasi anggaran disuplai oleh data perbandingan pagu yang diklasifikasi menjadi 4 kelompok, yakni:

- ☐ Perbandingan pagu antar IKK
- ☐ Perbandingan pagu antar output
- ☐ Perbandingan pagu antar unit kerja

- Perbandingan daya serap pagu antara Tahun 2015, 2016 dan 2018
Informasi tentang realisasi anggaran juga di dukung oleh data-data berikut ini:
- Pelaksanaan efisiensi anggaran
- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan gedung/bangunan
- Sejarah revisi anggaran

Berikut ini adalah hasil pengukuran kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018:

Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja 2018

No.	Indikator Kinerja	Rencana			Realisasi		
		Volume	Satuan	Pagu	Volume	Satuan	Pagu
1	Persentase satuan pendidikan yang telah dipetakan mutunya (dan pengukuran indeks efektivitas)	1.382	Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK)	1.707.197.000	1.381	Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK)	1.351.259.200
2	Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum	554	Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK)	6.062.773.000	556	Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK)	3.835.210.530
3	Sekolah Model yang Difasilitasi	144	Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK)	3.223.050.000	144	Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK)	3.201.869.700

Tabel 3.6. Rencana dan Realisasi Indikator Kinerja 2018

Perbandingan pagu antar IKK

- IKK Persentase SD, SMP, SMA dan SMK yang telah dipetakan mutunya : terealisasi anggaran sebesar Rp. 1.345.728.200,- sekitar 80.57 %
- IKK Persentase SD,SMP,SMA dan SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP terealisasi anggaran sebesar Rp. 6.367.043.580,- sekitar 73.97 %
- IKK Jumlah layanan system pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah, terealisasi sebesar Rp. 5.531.000,- sekitar 15.01%
- IKK Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan serta koordinasi lintas sektoral bidang Pendidikan Dasar dan Menengah terealisasi anggaran sebesar Rp. 2.166.191.496,- sekitar 98.57 %

Realisasi anggaran pada indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 paling tinggi serapannya pada indikator supervise dan fasilitasi satuan pendidikan, yaitu sebesar **99,06%**.

Perbandingan Rencana dan Realisasi Daya Serap

Realisasi Belanja Netto instansi pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp37.249.467.702 atau 90,29% dari anggaran belanja sebesar Rp41.258.100.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

***Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2018***

Uraian	2018		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	7,450,382,000	7,298,145,937	97.96
Belanja Barang	18,215,396,000	15,086,232,402	82.82
Belanja Modal	15,592,322,000	14,865,089,363	95.34
Total Belanja Kotor	41,258,100,000	37,249,467,702	90.28
Pengembalian		(3,175,312)	-
Jumlah	41,258,100,000	37,246,292,390	90.28

Realisasi Belanja 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 52,88% dibandingkan realisasi belanja tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadaan belanja modal diikuti dengan peningkatan belanja barang untuk mendukung rencana strategis yang dimulai pada TA 2018,
2. Kenaikan jumlah pagu belanja dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	7,298,145,937	4,214,582,845	73.16
Belanja Barang	15,086,232,402	16,880,047,508	(10.63)
Belanja Modal	14,865,089,363	3,270,679,180	354.50
Jumlah	37,249,467,702	24,365,309,533	52.88

Catatan Penting Lainnya

Untuk tahun anggaran 2018, LPMP Gorontalo menerima DIPA Awal dengan nomor dokumen DIPA-023.03.2.419510./2018 tanggal 05 Desember 2017 dengan total pagu sebesar Rp41.258.100.000. Adapun rincian revisi DIPA yang telah dilakukan sampai dengan periode 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Revisi Ke	Tanggal Revisi	Pagu	Alasan Revisi	Digital Stamp
I	15 Februari 2018	41,258,100,000	Untuk membuka blokir pagu perjalanan	3682-3063-5768-4330
II	2 Mei 2018	41,258,100,000	Untuk membuka blokir pagu kegiatan	7230-6623-8500-5438
III	26 Juli 2018	41,258,100,000	Untuk membuka blokir belanja modal	6529-0016-9529-7074
IV	23 Oktober 2018	41,258,100,000	Pemutakhiran Data POK	6529-0016-9529-7074

LAPORAN

Perencanaan penyerapan anggaran yang tergambar dalam dokumen PK Tahun 2018 memberikan informasi bahwa pada bulan Januari s.d. Maret realisasi anggaran terserap di bawah angka yang direncanakan, sedangkan realisasi penyerapan anggaran tinggi terjadi mulai bulan Mei, yang disebabkan karena terlaksananya rangkaian kegiatan Implementasi K13.

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp7.298.145.937 dan Rp4.214.582.845. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 73,16% dibandingkan dengan TA 2017.

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp14.939.830.602 dan Rp16.880.047.508. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018 mengalami penurunan 11,49% dari Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja barang non operasional, belanja jasa, serta belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sepanjang tahun 2018.

Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	3,256,295,814	1,022,959,376	218.32
Belanja Barang Non Operasional	183,377,000	1,832,542,683	(89.99)
Belanja Barang Persediaan	0	106,903,500	-
Belanja Jasa	126,853,680	491,475,780	(74.19)
Belanja Pemeliharaan	2,220,244,996	1,756,293,144	26.42
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7,705,494,312	3,689,688,695	108.84
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	82,324,000	-
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	1,450,000,000	7,907,880,000	(81.66)
Jumlah Belanja Kotor	14,942,265,802	16,890,067,178	(11.53)
Pengembalian Belanja	(2,435,200)	(10,019,670)	
Jumlah Belanja	14,939,830,602	16,880,047,508	(11.49)

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp14.865.089.363 dan Rp3.270.679.180. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 354,50 persen dibandingkan TA 2017 disebabkan karena penambahan pagu anggaran.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI T.A. 2018	REALISASI T.A 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	48,730,000	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,214,029,679	1,402,987,680	129.08
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11,651,059,684	1,818,961,500	0.00
Belanja Modal BLU	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	14,865,089,363	3,270,679,180	354.50
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	14,865,089,363	3,270,679,180	354.50

perbandingan pagu antar output dan perbandingan pagu antar unit kerja. Kedua perbandingan tersebut menghasilkan informasi bahwa:

1. Realisasi paling tinggi terwujud dari serapan anggaran pada output Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP sebesar **99.34%** dari pagu anggaran.
2. Realisasi paling rendah terdapat pada output Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Kurikulum sebesar **63.26 %** dari pagu anggaran.

Pelaksanaan program dan efisiensi anggaran Tahun 2018 masih menyisakan anggaran sebesar **Rp 3.718.116.986**. Sisa anggaran ini disebabkan karena belum optimalnya penyerapan anggaran pada output satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013, layanan dukungan manajemen eselon I, layanan internal (overhead) dan layanan perkantoran.

Bab 4

PENUTUP

**BAB
4****PENUTUP**

Capaian kinerja LPMP Gorontalo yang diukur dengan menggunakan dua pendekatan dokumen, perjanjian kinerja dan DIPA, menghasilkan sebuah kesatuan deskripsi capaian kinerja yang saling melengkapi.

Penyusunan deskripsi dilakukan dengan dua jenis analisis, yakni analisis pengukuran capaian kinerja organisasi (berbasis IKK dan berbasis Output RKAKL) serta pengukuran realisasi anggaran.

Hasil kedua analisis tersebut secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja organisasi terukur sebesar **99.99 %**

Hal ini berarti bahwa sebagian besar program/kegiatan telah dilaksanakan. Ketidakterlaksanaan beberapa program/kegiatan disebabkan karena faktor internal yakni kematangan dalam merumuskan kegiatan. Adapun faktor eksternalnya adalah pelaksanaan revisi anggaran yang berdampak penundaan waktu pelaksanaan kegiatan;

2. Realisasi anggaran sebesar **90.92 %** atau sebesar **Rp 37.252.643.014,-** dari pagu total **Rp. 40.970.760.000,-**. Hal ini berarti bahwa penggunaan pagu anggaran telah menerapkan kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program/kegiatan di LPMP Gorontalo .

Berikut ini adalah rekomendasi tahun 2018 yang disahkan oleh Kepala LPMP Gorontalo pada Forum Gelar Program 2018, untuk ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait:

Indikator Kinerja	Pelaksana	Rekomendasi
Persentase satuan pendidikan yang dipetakan mutunya	Seksi PMS	➤ Singkronisasi basis data untuk pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan ➤ Pelaksanaan monitoring pada kegiatan dalam output tsb hendaknya dapat disampaikan hasil analisis pengumpulan datanya pada akhir tahun anggaran
Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks efektivitasnya	Seksi PMS	Melakukan koordinasi/konsultasi dengan unit utama tentang ketepatan penggunaan alat ukur penghitungan indeks efektivitas satuan pendidikan
Persentase satuan pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	Seksi FPMP	➤ Menyusun hasil-hasil fasilitasi peningkatan mutu pendidikan ➤ Merekap data sasaran yang sudah dilakukan fasilitasi ➤ Singkronisasi basis data untuk pelaksanaan fasilitasi mutu pendidikan ➤ Pelaksanaan monitoring pada kegiatan dalam output tsb hendaknya dapat disampaikan hasil analisis pengumpulan datanya pada akhir tahun anggaran
Sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah	Seksi SI	Melakukan koordinasi/konsultasi dengan unit utama tentang penyusunan sistem pendataan dan informasi
Kerja sama bidang penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah	Widyaiswara bersama seluruh unit kerja di LPMP Gorontalo	➤ Menyusun hasil-hasil kemitraan dan kerjasama ➤ Merekap data pelaksanaan kemitraan dan kerjasama ➤ Mensosialisasi alur pelaksanaan kemitraan dan kerjasama

Indikator Kinerja	Pelaksana	Rekomendasi
dengan Dinas Pendidikan atau institusi/instansi lainnya		
Dukungan Kelembagaan	Subbag Umum	Rancangan kegiatan pendukung tata kelola kelembagaan diharapkan disusun secara efektif dan efisien, sesuai kebutuhan dan dipantau kebermanfaatannya
Penguatan SAKIP	Tim SAKIP (Tim Kinerja, Tim Pemantauan Pelaksanaan Program dan Tim SPI)	➤ Melakukan reviu Renstra 2015-2019 ➤ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik ➤ Mengembangkan sistem informasi online ➤ Meningkatkan reliabilitas, validitas dan akuntabilitas laporan ➤ Tepat waktu dalam penyampaian dokumen PK dan LAKIP ➤ Pembentukan Tim SAKIP ➤ Penetapan kontrak kerja pada semua eselon s.d staf

Sehubungan tentang penyusunan laporan kinerja Tahun 2018, berikut ini adalah beberapa catatan penting yang dapat menjadi informasi perbaikan bagi pelaksanaan pencapaian kinerja di tahun berikutnya, yaitu:

1. Perlu melakukan koordinasi/sinkronisasi lebih akurat dengan Ditjen Dikdasmen terkait penetapan sasaran strategis/indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi LPMP yang tertuang dalam Permendikbud RI Nomor 14 Tahun 2015;

Contoh ilustrasi:

Ketidakjelasan penempatan output sebagai pendukung IKK menjadi masalah dalam validitas capaian kinerja LPMP.

Output dalam RKAKL yang tidak jelas dapat disuntingkan dengan IKK yang harus dipertanggungjawabkan oleh LPMP, maka data capaian kinerja dari masing-masing LPMP yang dilaporkan kepada unit utama pembinaanya berpotensi menjadi informasi kinerja yang kurang akuntabel.

2. Perlu melakukan koordinasi yang lebih baik antara tim evaluasi kinerja dengan tim penyusun program dan anggaran, agar dapat diperoleh target kinerja yang realistis dan rincian anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan realisasinya;
3. Instruksi Kemdikbud terkait efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber - sumber daya dan dana yang dimiliki tetap diupayakan untuk mencapai target kinerja sebaik-baiknya dan mampu menghasilkan output yang relevan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja LPMP;
4. Capaian kinerja yang disampaikan diharapkan mengandung informasi capaian outcome yang terukur dengan baik. Sehubungan dengan hal ini diperlukan informasi yang jelas terkait outcome level direktorat yang menjadi payung outcome UPT;
5. Rencana kinerja tahunan yang disusun sebagai matrik pentahapan program/kegiatan dalam Renstra LPMP Gorontalo 2015-2019, harus terus dilakukan kajian dan evaluasi secara baik agar capaian kinerja dapat dicapai secara terukur dan realistis;

6. Seluruh tim yang dibentuk dalam rangka pencapaian kinerja lembaga yang optimal perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan serta daya dukung yang memadai guna melaksanakan tugasnya.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi barometer dalam perancangan program-program pada tahun berikutnya dengan kinerja yang semakin baik.

Apabila diperlukan, LPMP Gorontalo akan mengambil langkah-langkah strategis baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka mewujudkan tekad mendukung pembangunan pendidikan nasional khususnya di Provinsi Gorontalo .

Rencana Kinerja Tahunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE	TARGET				
				2014	2015	2016	2018	2018	2019
1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dasar melalui pemetaan mutu	Persentase SD yang dipetakan mutunya (IKK.3.4002.2.1-Dikdasmen)	%	90.15%	100%	67.6%	100%	100%	100%
		Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya (IKK.3.4002.2.2-Dikdasmen)	%	0	0%	1.4%	5%	5%	5%
		Persentase SMP yang dipetakan mutunya (IKK.3.4002.2.3-Dikdasmen)	%	71.48%	100%	62.0%	100%	100%	100%
		Persentase SMP Yang meningkat indeks efektivitasnya (IKK.3.4002.2.4-Dikdasmen)	%	0	0%	0.3%	5%	5%	5%
	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan menengah melalui pemetaan mutu	Persentase SMA yang dipetakan mutunya (IKK.3.4002.2.5-Dikdasmen)	%	71.41%	100%	46.8%	100%	100%	100%
		Persentase SMA Yang meningkat indeks efektivitasnya (IKK.3.4002.2.6-Dikdasmen)	%	0	0%	0.0%	5%	5%	5%
		Persentase SMK yang dipetakan mutunya (IKK.3.4002.2.7-Dikdasmen)	%	59.60%	100%	59.7%	80%	90%	100%
		Persentase SMK Yang meningkat indeks efektivitasnya (IKK.3.4002.2.8-Dikdasmen)	%	0	0%	0.3%	5%	5%	5%
2	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar	Jumlah layanan sistem pendataan dan informasi pendidikan dasar dan menengah (IKK.3.2005.1.3-Dikdasmen)	layanan	4	4	4	4	4	4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2014	TARGET				
					2015	2016	2018	2018	2019
3	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan dasar melalui supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP (IKK.3.4005.1.1-Dikdasmen)	%	0	16.8%	25%	40%	60%	80%
		Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui Implementasi K13	%		16%	25.0%	35%	40%	0
		Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui Sekolah Model	sekolah		0	0	56	56	56
		Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP (IKK.3.4005.1.2-Dikdasmen)	%	0	16.8%	25%	40%	60%	80%
		Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui Implementasi K13	%		16%	25.0%	35%	40%	0
		Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui Sekolah Model	sekolah		0	11	32	32	32
	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan menengah melalui supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP (IKK.3.4005.1.3-Dikdasmen)	%	0	16.8%	25.0%	40.0%	60.0%	80.0%
		Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui Implementasi K13	%		16%	25.0%	100%	0	0
		Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui Sekolah Model	sekolah		0	0	21	21	21
		Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP (IKK.3.4005.1.4-	%	0	16.8%	25%	40%	60%	80%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE	TARGET				
				2014	2015	2016	2018	2018	2019
		Dikdasmen)							
		Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui Implementasi K13	%		16%	25.0%	100%	0	0
		Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melalui Sekolah Model	sekolah		0	0	11	11	11
4	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui kerja sama bidang penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah	Kerja sama bidang penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan Dinas Pendidikan atau institusi/instansi lainnya minimal sebanyak 13 layanan (IKK.3.2005.1.5-Dikdasmen)	layanan	2	2	2	2	2	2
5	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui peningkatan tata kelola	Jumlah dokumen rumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pengendalian kegiatan serta koordinasi lintas sektoral bidang Pendidikan Dasar dan Menengah sebanyak 25 dokumen (IKK.3.2005.1.4-Dikdasmen)	dokumen	7	7	7	7	7	7

